

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN OBJEK
WISATA ALAM BUKIT SAKURA LAWU KABUPATEN
KARANGANYAR**

Skripsi

Disusun Guna Memenuhi Tugas Skripsi Program sarjana (S-1)

Program Studi Ilmu Politik



Oleh :

Putri Patricia

1906016014

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Ibu Dekan
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Ditempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Putri Patricia
NIM : 1906016014
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Objek Wisata
Alam Bukit Sakura Lawu Kabupaten Karanganyar

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Selasa 6 Juni 2023

Pembimbing 1



Dr. Ahwan Fanani, M.Ag
NIP: 197809302003121001

Pembimbing 2



M. Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP: 198409092019031007

PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa materi yang terkandung dalam skripsi ini sepenuhnya asli tanpa karya yang sebelumnya diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas atau lembaga pendidikan lainnya. Hasil dan sumber publikasi dijelaskan dalam tulisan dan referensi.

Semarang, Senin 19 Juni 2023



Putri Patricia
1906016014

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA ALAM BUKIT SAKURA LAWU KABUPATEN KARANGANYAR

Disusun Oleh

Putri Patricia

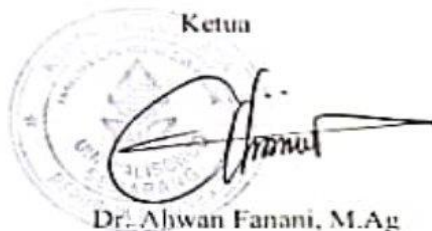
1906016014

Telah dipertahankan didepan majelis penguji sidang skripsi

Pada tanggal 21 Juni 2023 dan telah dinyatakan lulus

Susunan Dewan Penguji

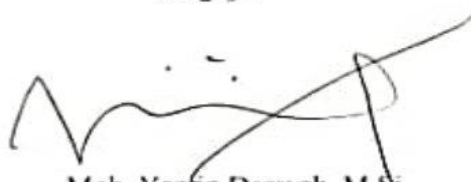
Ketua



Dr. Ahwan Fanani, M.Ag

NIP : 197809302003121001

Penguji I



Moh. Yanfin Darsyah, M.Si

NIP : 198409092019031007

Pembimbing I



Dr. Ahwan Fanani, M.Ag

NIP : 197809302003121001

Sekretaris



Masrohatun, M.Si

NIP : 198806212018012002

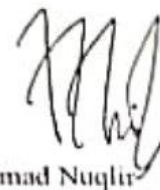
Penguji II



Masrohatun, M.Si

NIP : 198806212018012002

Pembimbing II



Muhammad Nuqlir

Bariklana, M.Si

NIP : 198409092019031007

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Bukit Sakura Lawu Kabupaten Karanganyar*. Untuk memperoleh gelar sarjana Sosial dari Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, skripsi ini diajukan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan mata kuliah.

Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis akan menerima kritik dan saran untuk membangun penulis dalam perbaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa tanpa dukungan dari beberapa pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun material sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penghargaan yang sangat tinggi penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya yang tiada henti yaitu kepada orang tua tercinta Bapak Sugiyanto, Bapak Sularno dan Ibu Sri Tugini yang telah memberikan *support system* terbaiknya untuk kesuksesan anaknya. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada:

1. Prof Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan penulisan skripsi.
3. Muhammad Nuqlir Bariklana. M.Si. selaku Wali Dosen dan pembimbing yang telah sabar memberikan arahan, motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag. selaku dosen pembimbing 1 yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Dr. Nur Syamsudin selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
6. Dosen dan para staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmu dan mengajarkan penulis
7. Bapak Nuryono, Bapak Edi, Bapak Eko, Bapak Ali Mas'udin, Ibu Fufung dan staf umum Perhutani Surakarta yang telah bersedia menjadi narasumber untuk menyempurnakan data dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Kedua Orang Tua (Bp. Sularno dan Ibu Sri Tugini) yang telah berkorban begitu banyak, sebagai *motivator* dan *support system* untuk kesuksesan anaknya.
9. Kepada kedua adik tersayang saya Sinta Maharani dan Laimuna Azzura Zahrani yang telah memberikan semangat, hiburan kepada penulis.
10. Teman-teman tercinta saya, Fitri, Ruki, Alfi, Dina, Mila, Ira, Milatul Zulfa yang telah memberikan dukungan serta semangat agar penulis cepat lulus.
11. Teman teman Gendhewa yang telah memberikan dukungannya kepada penulis, khususnya kepada sahabat jauh saya Aisyah Nur Ihsanti.
12. Kepada Mas Rifky Aziz Saputro Alfim yang pernah membantu, memberikan semangat, dan kenangannya kepada penulis waktu itu.
13. Pihak -pihak yang terkait dalam membantu memberikan dorongan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung dan tidak langsung, karen keterbatasan penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu.

Dengan segenap ketulusan hati, semoga Allah memberikan balasan bagi mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang telah mereka berikan kepada penulis. Disamping itu, penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi jauh dari kata sempurna. Untuk itu, dengan segenap kerendahan hati penulis bermaksud untuk meminta kritik maupun saran dari pembaca sehingga dikemudian hari akan tercipta karya ilmiah yang lebih baik lagi.

Terimakasih

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, Senin 19 Juni 2023



Putri Patricia

PERSEMBAHAN

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Dengan mengucapkan segala syukur Alhamdulillahirabbil'amin

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang terkasih

Ibu Sri Tugini yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik saya dengan sabar, penuh doa dan dukungannya, serta memberi kasih sayang tiada henti untuk putrinya.

Dan juga untuk Almater Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, semoga semakin banyak dalam mencetak lulusan-lulusan yang baik.

MOTTO

”Hakikat hidup adalah pengendalian diri”

-K.H Ma’ruf Islamuddin-

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Bukit Sakura Lawu Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dari masing-masing *stakeholder*, relasi yang terbentuk dari tiap *stakeholder*, dan dinamika yang terjadi di dalam sebuah proses kolaborasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, tempat penelitian ini dilaksanakan di Objek Wisata Alam Bukit Sakura Lawu Kabupaten Karanganyar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan observasi, wawancara mendalam dengan *stakeholder* Bukit Sakura Lawu, pedagang Bukit Sakura Lawu, tokoh masyarakat, dan tokoh agama Desa Tlogo Dringo yang terlibat serta memiliki informasi penting mengenai kolaborasi *stakeholder* dalam pengelolaan Objek Wisata Bukit Sakura Lawu. Peneliti menggunakan alat perekam, catatan lapangan, tinjauan pustaka, jurnal, dan bahan-bahan terkait dengan penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang dihubungkan dengan data lapangan dan mengolahnya menjadi satu kesatuan yang dapat dijelaskan dalam penulisan ini.

Hasil dari penelitian ini, mengidentifikasi peran-peran dari tiap *stakeholder* serta relasi yang terjadi antar *stakeholder* dengan proses kolaborasi Ansel dan Gash. Rangkaian proses kolaborasi meliputi a) kondisi awal, di dalam kondisi awal terdapat tiga tahapan relasi yaitu ketidakseimbangan sumber daya, kendala pada partisipatif, dan konflik kondisi awal. b) proses kolaborasi, di dalam proses kolaborasi merupakan tahapan dimana peran dan relasi *stakeholder* terbentuk, dalam proses ini terdapat beberapa tahapan yaitu, tahap tatap muka, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, relasi desain kelembagaan dan hasil menengah. c) hasil akhir, hasil akhir merupakan sebuah pencapaian akhir dalam proses kolaborasi.

Kata kunci : stakeholder, relasi, kolaborasi

ABSTRACT

This study examines Collaborative Governance in the Management of Nature Tourism Objects Bukit Sakura Lawu, Karanganyar Regency. This study aims to describe the role of each stakeholder, the relationships formed by each stakeholder, and the dynamics that occur in a collaborative process.

This study used a qualitative method, where the research was carried out at the Bukit Sakura Lawu Nature Tourism Object, Karanganyar Regency. Data collection techniques in this study were obtained by observation, in-depth interviews with Bukit Sakura Lawu stakeholders, Bukit Sakura Lawu traders, community leaders, and religious leaders from Tlogo Dringo Village who were involved and had important information about stakeholder collaboration in managing the Bukit Sakura Lawu Tourism Object. The researcher's use of recording devices, field notes, literature reviews, journals, and research-related materials to this research. In analyzing the data, this study uses qualitative data analysis which coordinates with field data and processes them into a single unit that can be described in this paper.

The results of this study identify the roles of each stakeholder and the relationships that occur between stakeholders with the Ansel and Gash collaboration process. The series of collaboration processes includes a) initial conditions, in the initial conditions there are three stages of relations, namely resource imbalance, participatory constraints, and initial conflict conditions. b) the collaboration process, in the collaboration process is the stage where stakeholder roles and relationships are formed, in this process there are several stages, namely, the face-to-face stage, commitment to the process, mutual understanding, institutional design relations and intermediate results. c) final result, the final result is a final achievement in the collaboration process.

Keywords: stakeholders, relations, collaboration.

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat teoritis	6
2. Manfaat praktis	6
F. Kerangka Teori	12
1. Definisi Konseptual	12
2. Teori <i>Collaborative Governance</i> Ansel dan Gash.....	13
G. METODE PENELITIAN	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Sumber Data.....	15
3. Teknik Pengumpulan Data	15
H. SISTEMATIKA PENULISAN	18
BAB II.....	20
<i>GOVERNANCE DAN COLLABORATIVE GOVERNANCE</i>	20
A. Konsep <i>Governance</i>	20
1. Sejarah konsep <i>Governance</i>	20
2. Pengertian <i>Governance</i>	21
3. Pergeseran Paradigma <i>Governance</i>	22
B. <i>Collaborative Governance</i>	23

1. Pengertian <i>Collaborative Governance</i>	23
2. Perkembangan <i>Collaborative Governance</i>	24
3. Teori <i>Collaborative Governance</i> Anshel & Gash.....	26
4. Proses <i>Collaborative Governance</i>	27
BAB III	37
POTRET KABUPATEN KARANGANYAR DAN OBJEK WISATA ALAM BUKIT SAKURA LAWU	3
7	
A. POTRET KABUPATEN KARANGANYAR	37
1. Sejarah Kabupaten Karanganyar.....	37
2. Kondisi Geografis dan Demografi Kabupaten Karanganyar	37
3.) Kondisi Sosial Kabupaten Karanganyar.....	40
4.) Kondisi politik Kabupaten Karanganyar	42
5.) Kondisi Ekonomi Kabupaten Karanganyar.....	43
B. POTREK OBJEK WISATA ALAM BUKIT SAKURA LAWU KABUPATEN KARANGANYAR 45	
1. Profil Objek Wisata Alam Bukit Sakura Lawu.....	45
2. Potensi Objek Wisata Bukit Sakura Lawu	46
3. Struktur Organisasi Pokdarwis Objek Wisata Alam Bukit Sakura Lawu 47	
5. Kebudayaan Bukit Sakura Lawu.....	48
BAB IV	51
IDENTIFIKASI DAN PERAN <i>STAKEHOLDER</i> DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA BUKIT SAKURA LAWU	51
A. Identifikasi <i>Stakeholder</i>	51
1. Perum Perhutani Semarang (Divisi Regional Jawa Tengah)	51
2. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH Dono Lestari)	53
3. Masyarakat Peduli Api (MPA Singo Lawu)	55
4. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS BSL)	57
5. Palawi Risorsis.....	58
B. Peran <i>Stakeholder</i>	60
a. Peran <i>Stakeholder</i> Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Bukit Sakura Lawu 61	
b. Proses kolaborasi dalam pengelolaan Objek Wisata Alam Bukit Sakura Lawu	66
BAB V	71

RELASI STAKEHOLDER DALAM TATA KELOLA OBJEK WISATA BUKIT SAKURA LAWU	71
A. Relasi <i>Stakeholder</i> Bukit Sakura Lawu Pada Kondisi Mulai.....	71
B. Relasi <i>Stakeholder</i> Bukit Sakura Lawu Pada Proses Kolaborasi	75
C. Relasi <i>Stakeholder</i> Bukit Sakura Lawu Hasil Akhir.....	79
BAB VI.....	85
PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
Lampiran	87
Dokumentasi.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informan	16
Tabel 3.1 Pembagian wilayah administratif Kabupaten Karanganyar	38
Tabel 3.2 Ketinggian Wilayah di Kabupaten Karanganyar	39
Tabel 3.3 Fasilitas sosial Kabupaten Karanganyar	41
Tabel 4.1 Stakeholder dan perannya dalam pengelolaan Objek Wisata Alam Bukit Sakura Lawu.....	68
Tabel 5.1 Data kolaborasi stakeholder dalam pengelolaan Bukit Sakura Lawu Kabupaten Karanganyar.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses collaborative governance	27
Gambar 3.1 Pohon Sakura asli di Bukit Sakura Lawu	47
Gambar 3.2 Suasana camping di Objek Wisata Bukit Sakura Lawu	47
Gambar 4.1 Penanaman Pohon BKPH Lawu Utara.....	57
Gambar 4.2 Apel Siaga Bersama Gubernur Jawa Tengah	65
Gambar 5.1 Penghargaan dari Perum Perhutani	72
Gambar 5. 2 Pertemuan stakeholder BSL	75
Gambar 5.3 Rapat rutin LMDH dengan MPA, dan Pokdarwis	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi di sebuah Negara, pariwisata sendiri dapat membantu menjadi sebuah pemasukan bagi Negara khususnya pemasukan kas bagi Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "pariwisata" adalah berbagai kegiatan yang berkaitan dengan wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang ditawarkan oleh masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Spilane, mengatakan bahwa pariwisata adalah sebuah perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya yang bersifat kontemporer yang di lakukan individu atau kelompok sebagai suatu usaha untuk menemukan kebahagiaan (Sholeha, 2016).

Tata kelola pariwisata dalam *prespektif Collaborative Governance* merupakan sebuah cara pandang yang menarik untuk dibicarakan saat ini. Karena pesatnya kemajuan pariwisata membuat beberapa *stakeholder* yang memiliki kepentingan berlomba-lomba untuk terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan pariwisata, Ansel dan Gash (Zaenuri, 2016) menyatakan bahwa tata kelola kolaboratif merupakan salah satu cara untuk menjawab keinginan pemangku kepentingan dalam berpartisipasi untuk pelaksanaan pembangunan dan mengatasi keterbatasan dana pemerintah yang tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat untuk terwujudnya kinerja pemerintah yang lebih baik. Tujuannya adalah untuk memperoleh sumber daya dengan melaksanakan pembangunan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan tersebut. (Sambodo, 2016).

Kabupaten Karanganyar sendiri telah memiliki tiga sektor yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian, salah satunya ada di sektor wisata. Berbagai potensi wisata tersebar di beberapa daerah dan masing-masing memiliki kualitas tersendiri. Banyak wisatawan yang mengutamakan

agrowisata, wisata alam, wisata ziarah, dan wisata budaya-sejarah untuk menikmati rekreasi outdoor di alam terbuka sambil menghirup udara segar, menikmati pemandangan, dan bersantai di alam. Potensi yang sudah ada dapat mendorong tumbuhnya tren pariwisata yang berdampak pada munculnya pola perilaku konsumen atau tren konsumsi wisatawan untuk bentuk pariwisata yang lebih maju. Selain wisata alam atau agrowisata dari suatu daerah, wisatawan lebih tertarik untuk mengkonsumsi barang atau karya kreatif (*culture*) dan peninggalan sejarah (*heritage*) (Yuliana, 2010).

Kabupaten Karanganyar memiliki beberapa destinasi wisata yang memanfaatkan hutan sebagai tempat rekreasi dan juga tempat wisata, sehingga harus mendapatkan izin dari Perhutani Jawa Tengah. Perlu ditegaskan bahwa, kawasan hutan yang telah masuk kedalam wana wisata memiliki prinsip menjaga kelestarian hutan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardjanto (Hardjanto, Pengelolaan Hutan Rakyat, 2017) dimana prinsip yang harus dipegang oleh pengelola kawasan hutan harus melihat dari segi ekologi, ekonomi dan sosial budaya. Prinsip dalam pengelolaan hutan termasuk kedalam objek wisata yang terdaftar sebagai wana wisata, untuk meminimalisasi efek negatif, kesadaran lingkungan dan budaya, pengalaman baik bagi wisatawan (pengunjung) dan penerima (tuan rumah), pemberian penghargaan dan pemberdayaan bagi masyarakat local. Sehingga pengelola serta *stakeholder* yang menaungi kawasan hutan yang masuk kedalam hutan wana wisata, seharusnya tidak boleh mengambil kebijakan yang sekiranya akan menimbulkan dampak yang telah keluar dari prinsip-prinsip wana wisata yang dilindungi oleh pemerintah.

Senada dengan penelitian yang telah dikemukakan tersebut, Pemerintah juga telah mengatur pengelolaan konservasi wana wisata hutan dalam keputusan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/5/2020 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan. Peraturan ini telah disebutkan bahwa hutan wisata merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan secara

khusus, dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata. Dengan demikian perlu dibentuk sebuah peraturan dalam prinsip pembangunan, persyaratan serta pelaksanaan pembangunan, sehingga dalam pengelolaannya harus mengikuti prinsip-prinsip kelestarian hutan guna meminimalisir kerusakan dari hutan yang ada.

Kabupaten Karanganyar termasuk kota wisata, dimana terdapat 22 (Dua Puluh Dua) objek wisata yang masuk kedalam wana wisata konservasi hutan yang dilindungi oleh Pemerintah. Pengembang atau investor dari swasta yang ingin mengajukan diri sebagai pengelola wisata di wilayah Kabupaten Karanganyar, harus mendapatkan izin dari Perhutani Suarakarta. Serta harus mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan agar tetap menjaga kelestarian hutan. Terdapat beberapa pengelola yang mengambil sebuah kebijakan keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Dikutip dari portal (Detik.com pada tanggal 22 September 2020) hutan wana wisata yang ada di lereng Gunung Lawu mengalami kerusakan. Kerusakan ini disebabkan karena adanya pengembang yang melakukan kenakalan dengan membabat habis hutan seluas 7 (Tujuh) Hektare, sedangkan Perhutani Suarakarta hanya memberikan izin seluas 1,3 hektare untuk dijadikan tempat wisata. Dengan adanya pembabatan serta penggundulan hutan secara liar dan tanpa izin ini, dikhawatirkan akan menyebabkan banjir serta tanah longsor bagi permukiman masyarakat yang ada di bawah lereng Gunung Lawu.

Salah satu wisata di Kabupaten Karanganyar yaitu Bukit sakura lawu, Bukit Sakura lawu merupakan salah satu objek wisata yang memperhatikan fungsi hutan yaitu sebagai tanah konservasi hutan atau sebagai hutan penyangga, dalam hal ini Bukit Sakura Lawu termasuk kedalam wana wisata alam. Wana wisata Taman Sakura Lawu (Sakral), merupakan wisata kerjasama Perhutani bersama Toyota Indonesia dalam rangka 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang yang berlokasi di Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Blumbang, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Lawu Utara, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Suarakarta, selain itu Pemerintah juga

menggandeng beberapa komunitas sadar wisata yang ada di sekitar Bukit Sakura Lawu, diantaranya adalah MPA Singo Lawu, LMDH Lawu Utara dan Juga Pokdarwis Bukit Sakura Lawu untuk mengelola bukit sakura Lawu.

Bukit Sakura Lawu merupakan tempat wisata alam yang memiliki konsep perpaduan antara hutan yang indah dan sejuk khas pegunungan dengan beberapa tanaman Sakura yang memang sengaja didatangkan langsung dari Jepang. Dengan konsep perpaduan inilah diharapkan Bukit Sakura Lawu dapat menjadi tempat wisata yang estetik bagi para wisatawan dengan pengelolaan yang profesional. Bukit Sakura Lawu selain menyediakan pemandangan yang indah juga sebagai tempat camping, rekreasi keluarga, acara-acara penting dan terdapat jeep adventure. Awal peresmian Bukit Sakura Lawu jumlah wisatawan yang berkunjung di Bukit Sakura Lawu mencapai kurang lebih 1000 wisatawan, akan tetapi karena terdapat beberapa problematika kini hanya mencapai 20-30 wisatawan setiap bulannya.

Pengelolaan di Bukit Sakura Lawu saat ini dipegang oleh PT Toyota Indonesia dengan Perhutani Surakarta, bersama dengan para komunitas-komunitas yang ada di Bukit Sakura Lawu. Dalam berjalannya kolaborasi antar *stakeholder* Bukit Sakura Lawu terjadi dinamika dalam berinteraksi, contoh kasusnya adalah terjadi keterlambatan kerjasama antara pihak investor Palawi Risorsis dengan Pokdarwis, sehingga menyebabkan status Bukit Sakura Lawu tidak jelas. Selain itu, terjadi perbedaan pendapat terkait pengaspalan lahan parkir. Pengaspalan ini ingin dilakukan oleh investor yang merasa bahwa objek wisata Bukit Sakura Lawu ini masih Perlu adanya pembangunan, karena dengan demikian penghasilan yang didapatkan juga akan bertambah. Sedangkan hal ini telah ditentang oleh beberapa komunitas sadar wisata yang Merupakan Pengelola objek wisata Bukit Sakura Lawu. Pengelola merasa jika pengaspalan dilakukan maka akan mengakibatkan kerusakan alam karena termasuk ke dalam bentuk pengerasan dan juga sangat merugikan pedagang disana, karena akan ada pemindahan posisi tempat jualan bagi para pedagang. Sehingga seharusnya perlu adanya koordinasi yang baik antar *stakeholder*.

Studi mengenai *Collaborative Governance* sebenarnya telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya yang dilakukan oleh Ginting, (2019) dalam penelitian ini lebih melihat serta menganalisis *Collaborative Governance* dalam pengembangan kawasan objek wisata, kemudian Putra (2021) dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat *collaborative governance* dalam pengelolaan objek wisata di Goa pindul. Selanjutnya, Tongkotow (2020). Penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratatotok, dan terakhir, Hariadi (2017) dalam penelitian ini digunakan untuk melihat tindakan kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata pasir putih Bira Kabupaten Bulukamba. Dalam beberapa penelitian terdahulu telah terlihat jelas bahwa belum ada yang telah membahas secara spesifik bagaimana peran serta dinamika interaksi antar *stakeholder* dalam melakukan kerjasama guna memajukan sebuah objek wisata agar menjadi tempat wisata yang menarik bagi masyarakat.

Dengan adanya perbedaan fokus penelitian dari peneliti dengan studi terdahulu maka disini peneliti akan menegaskan focus dalam kajian penelitian ini yakni mengenai pengembangan penelitian mengenai dinamika interaksi antar *stakeholder* didalam pengelolaan Bukit Sakura Lawu Kabupaten Karanganyar. Sehingga dapat dilihat bahwa *Collaborative Governance* dari setiap kebijakan perlu diadakan koordinasi yang baik antar setiap lini dalam pengelolaan pariwisata. Dengan demikian, dari fakta-fakta yang telah diungkapkan oleh penulis diatas, maka penulis akan mengangkat judul *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Bukit Sakura Lawu Kabupaten Karanganyar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan berdasarkan dua rumusa masalah:

1. Bagaimana peran *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Bukit Sakura Lawu?
2. Bagaimana relasi antar *stakeholder* dalam pengelolaan Bukit Sakura Lawu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami peran *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Bukit Sakura Lawu di Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk mengetahui dan memahami relasi dari seriap *stakeholder* pengelola objek wisata Bukit Sakura Lawu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan teori seebagai pelengkap keilmuan tentang *collaborative governance* pengelolaan pariwisata
 - b. Hasil dari penelitisn ini dapat dijadikan tinjauan dalam penelitian terkait *collaborative governance* pada sektor pariwisata
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam aspek *collaborative governance* untuk pariwisata Bukit Sakura Lawu Kabupaten Karanganyar
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru terkait *collaborative governance* dari setiap pengelola di tempat wisata

E. Tinjauan Pustaka

Guna menyusun skripsi diperlukan studi literatur karena akan digunakan sebagai pedoman penulisan dan tentunya untuk memastikan bahwa permasalahan yang dibahas tidak bertentangan dengan permasalahan yang telah dibahas, artinya penulis akan mendalami permasalahan yang ada dan belum pernah dibahas

sebelumnya. Buku-buku tesis, dan karya ilmiah lainnya yang nantinya akan dijadikan tesis dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Disini peneliti akan membagi tinjauan pustaka ini menjadi dua tema, yakni tema *collaborative governance* dan juga tema pengelolaan pariwisata, diantaranya sebagai berikut:

1. Tema *Collaborative Governance*

Pertama, Studi yang ditulis oleh M Dipo Delpiero Ginting, (2019). Judul penelitian tersebut adalah “Pendekatan *Collaborative Governement* Dalam Pengembangan Kawasan Objek Wisata Goa Putri di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan”. Fokus dalam Penelitian ini adalah memastikan dan mengevaluasi tata kelola koperasi dalam pengembangan kawasan wisata Goa Putri di Kabupaten Ogan Komering Ulu, serta memastikan apa yang menjadi factor penghambat dalam pelaksanaannya. Hal ini terjawab dengan Kerjasama yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dimana pihak swasta sebagai tour operator berupaya memberikan sosialisasi berupa promosi wisata, pengembangan sektor pariwisata, peningkatan produk wisata, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kawasan wisata. Hasil penelitian berupa Kerjasama antar pihak yang masih memiliki kekurangan dan kelemahan, sehingga membuat sebuah kesimpulan mengenai tahapan proses tata Kelola kolaboratif.

Kedua, Studi yang dilakukan oleh Dimas Adi Putra (2021) yang berjudul “*Collaborative Government* Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul (Studi Kasus BUMDes Maju Mandiri&Kelompok Sadar Wisata Bejiharjo, Karangmojo, Gunung Kidul 2017-2018).” Penelitian ini dibuat karena untuk melihat kolaborasi *stakeholder* dalam pengelolaan objek wisata di Goa pindul. Sebelum terbentuknya BUMDes, Kelompok Sadar Wisata Desa Bejiharjo mengelola hasil-hasil objek wisata Goa Pindul, namun dengan terbentuknya BUMDes sehingga termasuk ke dalam PADes. Namun, menurut Bagyo pengelola Pokdarwis Desa Bejiharjo pengelolaan objek wisata dilakukan bersama dengan BUMDes, sehingga dalam penelitian ini melihat kolaborasi antara BUMDes dengan Pokdarwis dalam pengelolaan Goa Pindul

Ketiga, Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Nadia F tongkotow (2020) dengan judul dalam jurnal tersebut adalah tersebut yaitu, “*Collaborative Government Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratatotok*.” Fokus dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratatotok Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* adalah pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung berkolaborasi dengan pemangku kepentingan non-publik melalui proses pengambilan keputusan kolektif yang formal didorong oleh konsensus, dengan tujuan mengembangkan atau menerapkan kebijakan publik, mengelola program atau aset publik.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Djulianto (2022), judul penelitian yaitu “*Collaboratie Governance Dalam Pengelolaan Desa Wisata Sambi di Dusun Sambi, Pakembinangan, Pakem, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Fokus dalam Penelitian ini adalah melihat Pengelolaan Desa wisata. Melalui promosi desa wisata menghasilkan lapangan kerja, mendistribusikan pendapatan, melindungi lingkungan dan budaya lokal, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan menjunjung tinggi kepercayaan serta nilai-nilai tradisional adalah bentuk pembangunan berkelanjutan. Masyarakat setempat dan pihak swasta yang diberi hak untuk mengaturnya juga memberikan dampak pada keberhasilan pengelolaan industri pariwisata, selain Pemerintah Desa.

Melalui penelitian ini ditemukan bahwa dalam pengelolaan desa wisata sambi terdapat ketimpangan kolaborasi yang semu dan posisi tidak setara antar actor dalam pengelolaan desa wisata sambi. Hal tersebut diketahui berdasarkan peran-peran aktor dan proses kolaborasi. Peran swasta sebagai aktor pemilik modal mendominasi pengelolaan destinasi wisata baik manajemen pengelolaan pariwisata maupun pengembangan atraksi dan akomodasi. Pemerintah belum banyak memainkan perannya selain sebagai pemilik lahan yang disewakan kepada pihak Ledok Sambi dan Sambi Resort untuk kegiatan pariwisata.

Kelima, Skripsi yang telah disusun oleh Andi Hariadi (2017), mengenai ”*Collaborative Governance* dalam pariwisata Pantai Pesisir Pantai Pasir putih” dengan hasil penelitian kolaborasi Pemerintah Kabupaten Bulukumba tentang wisata pantai pasir putih bira belum memfasilitasi secara maksimal karena jarang ada pelatihan dan sosialisasi tentang kepariwisataan guna meningkatkan kemampuan pihak yang berkolaborasi, dan untuk memajukan proses kolaborasi pihak yang bekerjasama jarang melakukan pertemuan.

Dari Penelitian diatas dapat dilihat distingsi atau perbedaan antara karya ilmiah terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan pada tema *Collaborative Governance*. Dimana dalam tema ini, karya ilmiah terdahulu banyak membahas tentang bagaimana pola interaksi komunikasi antar *stakeholder* yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan pariwisata disebuah daerah, namun belum melihat secara spesifik atau menganalisa secara mendalam bagaimana dinamika komunikasi yang berjalan dalam pengelolaan pariwisata.

2. Pengelolaan Pariwisata

Pertama, studi yang ditulis oleh Nurfadila (2018), dengan judul penelitian yaitu “Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Lewaja di Kabupaten Enrekang” Fokus dalam Penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana peran Pemerintah (Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata), dalam mengelola objek wisata, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Pemerintah (Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata) dalam pengelolaan sektor pariwisata adalah melengkapi sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Faktor yang mempengaruhi pengembangan pobjek wisata adalah faktor pendukung yaitu partisipasi masyarakat dan banyaknya potensi pariwisata, sedangkan faktor penghambat adalah keterbatasan dana, serta akses menuju objek wisata masih kurang.

Kedua, Studi yang dilakukan oleh Nurhikma (2019), dengan judul penelitian yaitu “Strategi Pengelolaan Objek Wisata Pantai Lamangkia (Studi

Kasus Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Takalar)” Penelitian ini berfokus pada strategi dinas pariwisata pemuda dan olahraga kabupaten takalar dalam mengelola objek wisata pantai lamangkia. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa strategi dinas pariwisata pemuda dan olahraga Kabupaten Takalar dalam pengelolaan objek wisata pantai lamangkia belum maksimal karena banyaknya strategi yang di buat masih dalam tahap rencana. Adapun faktor pendukung dalam mengelola pantai lamangkia yaitu investor yang ingin bekerjasama dan potensi pantai yang bagus serta faktor penghambatnya yaitu status kepemilikan lahan yang tidak jelas, keterbatasan anggaran, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam merawat sarana dan prasarana pantai lamangkia.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Sindi Safitri (2020), dengan judul penelitian ”Pengelolaan Wisata Danau Bambu Terhadap Minat Pengunjung (Desa Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)”. Fokus penelitiannya mengkaji danau bekas tambang pasir yang terbengkalai namun, beberapa tahun terakhir ini ada objek wisata yang bernama Objek Wisata Danau Bambu yang viral dan banyak menarik minat wisatawan. Penelitian ini berupaya menemukan model pengelolaan apakah sudah sesuai dengan prinsip prinsip dan metode yang telah ada. Serta bagaimana pengelola memanfaatkan sumber daya alam yang sudah ada. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi minat wisatawan untuk memutuskan berlibur ke Objek Wisata Danau Bambu Desa Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui apakah pengelolaan yang baik bisa mendatangkan wisatawan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pengelolaan Objek Wisata Danau Bambu belum maksimal menerapkan prinsip – prinsip pengelolaan suatu Objek Wisata dan penggunaan Metode Pengelolaannya tidak semuanya direalisasikan semuanya. Namun, ada beberapa prinsip dan metode yang sudah di jalankan dengan baik. Maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan, pengelolaan objek wisata danau bambu sudah baik. Dan faktor yang mempengaruhi minat pengunjung yaitu faktor pelayanan dan faktor pengalaman.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Khairi Rahmi (2017), dengan judul penelitian “Politik Pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Bintan Tahun 2013-2015”. Fokus penelitiannya mengkaji mengenai politik pengelolaan objek wisata di Kabupaten Bintan yang berfokus pada hubungan antara pemerintah dan pihak asing serta menggambarkan dampak yang terjadi ketika melibatkan pihak asing dalam pengelolaan tersebut. Terdapat dua teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori yang berkaitan dengan pengelolaan dan ekonomi politik. Dalam kerangka teori dijelaskan mengenai definisi pengelolaan, peran pemerintah dalam pengelolaan dan permasalahan dalam pengelolaan dari beberapa ahli. Sedangkan, pendekatan ekonomi politik digunakan untuk menjelaskan konflik yang terjadi dalam proses politik yang terjadi dalam pengelolaan tersebut. Sehingga akan terlihat dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh *stakeholder* adanya keterlibatan pihak asing dalam pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Bintan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa meskipun sudah ada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, namun pengeloalannya masih belum maksimal. Serta fokus pengeloalan masih terkonsentrasi pada kawasan wisata Lagoi, karena wisata tersebut yang paling potensial di antara yang lainnya. Keterlibatan pihak asing disini sebagai investor yang menanamkan modal di wisata Lagoi, karena pemeritah membutuhkan insentif anggaran.

Kelima, Studi penelitian oleh Rafika Sasole (2018), yaitu “Pengelolaan Objek Wisata Pantai Halasy Dalam Rangka Menarik Kunjungan Wisatawan (perspektif ekonomi islam)”. Dalam penelitian ini berfokus pada Bagaimana fasilitas objek wisata pantai halasy berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan dan Bagaimana pengelolaan objek wisata pantai halasy dalam perspektif islam. Kesimpulan akhir dipenelitian ini bahwa Dalam pengelolaan Fasilitas Objek wisata pantai halasy ini sudah bagus untuk menarik kunjungan wisatwan namun perlu di tingkat atau di tambahkan lagi fasilitas-fasilats yang dibutuhkan para wisatawan yang belum tersedia. Rata-rata para pengunjung objek wisata pantai ini dan berdasarkan dari hasil wawancara dengan

pengunjung, ternyata daya tarik dari objek wisata ini adalah fasilitasfasilitasnya dan pemandangan alam yang ada fasilitas.

Dari Penelitian diatas dapat dilihat bahwa dalam tema ini, karya ilmiah terdahulu banyak membahas tentang bagaimana pengelolaan pariwisata disebuah daerah itu dilakukan, namun belum melihat secara spesifik atau menganalisa secara mendalam bagaimana sebuah *stakeholder* yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan pariwisata berperan dalam melakukan interaksi dan kerjasama yang baik dalam memajukan tempat wisata. Kemudian dalam persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah bagaimana melihat juga faktor penghambat dan faktor pendukung dalam sebuah kebijakan pariwisata di sebuah daerah.

F. Kerangka Teori

1. Definisi Konseptual

a. Governance

Governanace merupakan kondisi, aktivitas, kegiatan dalam melaksanakan pemerintahan atau suatu proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau negara, pembangunan masyarakat, ekonomi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan privat atau swasta. Istilah pemerintahan berasal dari “*govern*”, yaitu peran yang lebih besar dan lebih beragam untuk ditambahkan, berasal dari seluruh proses aturan, hukum, dan kelembagaan untuk pengelolaan dalam suatu tujuan. Pengertian secara luas *governance* merupakan usaha totalitasi dari seluruh elemen, yaitu lembaga, unsur masyarakat, pemerintahan dan non-pemerintahan. (Dwiyanto, 2016)

Konsep *governance* merupakan sebuah tata kelola pemerintahan yang mencakup lebih luas, dengan menggandeng beberapa elemen pendukung lainnya seperti, swasta dan masyarakat. Stoker, (Dewi, 2019) membagi lima posisi mengenai *governance*, yaitu : 1) *governance* merujuk pada kepada sebuah institusi dan aktor, 2) *governance* tidak memberikan batas-batas dan tanggungjawab dalam mengatasi isu sosial dan isu ekonomi, 3) *governance*

mengidentifikasi adanya ketergantungan hubungan antara institusi yang terlibat, 4) *governance* berada pada *self-governing* otonom dari aktor-aktor, 5) *governance* menyadarkan untuk memperbaiki sesuat tidak perlu mengandalkan pemerintahan melalui perintah dan kewenangannya.

b. Collaborative Governance

Secara bahasa *Collaborative* berasal dari bahasa latin *com* “dengan”, dan *labore* “berusaha”. Sehingga kolaborasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk kerja sama, sedangkan *governance* berasal dari kata “*govern*” yang berarti mengambil peran yang lebih besar. Secara istilah *collaborative governance* menurut Ansel. C dan Gash. A, yang menyatakan bahwa *Collaborative governance* mencakup kemitraan isntitusi pemerintahan untuk pelayanan publik. (Kusnardijo, 2020) .

Menurut Ansel dan Gash *collaborative governance* penting untuk dilakukan antara lain yaitu, pertama kegagalan pada implementasi kebijakan di tataran lapangan. Kedua, ketidakmampuan kelompok-kelompok terutama karena pemisahan rezim-rezim kekuasaan untuk menggunakan arena-arena institusi lainnya, sehingga menghambat keputusan. Ketiga, terjadinya mobilisasi kelompok kepentingan. Keempat, tingginya biaya dan politisasi regulasi (Ansel dan Gash:2007). Selain beberapa alasan tersebut, penggunaan konsep *collaborative governance* adalah sebagai sebuah alternatif bagi pemangku kepentingan dalam mewujudkan sebuah relasi yang sehat. Secara umum *collaborative governance* dengan sadar terbentuk karena beberapa alasan tertentu, yaitu kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi, konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam, dan upaya mencari cara baru untuk mencapai legitimasi politik (Mutiarawati & Sudarmo, 2021).

2. Teori *Collaborative Governance* Ansel dan Gash

Collaborative governance menurut Ansel dan Gash merupakan sebuah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat beragam kebijakan dan berkumpul di suatu forum untuk menerapkan kebijakan

tersebut. Ansel dan Gash dalam teori nya menekankan pada enam elemen penting untuk menjalankan suatu kolaborasi yaitu, pertama forum dimulai oleh badan lembaga publik, kedua aktor non-negara berpartisipasi, ketiga peserta terlibat secara langsung, keempat forum dibentuk secara formal dan bertemu bersama, kelima forum bertujuan untuk membuat keputusan bersama, dan keenam dokus kolaborasi adalah pada manajemen publik. Proses kolaborasi, menurut Ansel dan Gash, dibagi menjadi tiga proses yaitu, kondisi mulai (*starting conditions*), proses kolaborasi (*collaborative process*) dan hasil akhir (*outcomes*) (Chris & Gash, 2007).

Oleh karena itu dalam penelitian ini melalui teori *Collaborative Governance* dari Anshel dan Gash, dapat dilihat dari keadaan sebelum Objek Wisata Bukit Sakura Lawu di pegang oleh *stakeholder* yaitu seperti POKDARWIS, Bukit Sakura Lawu masih berupa hutan belantara yang rentan akan longsor karena kurangnya pengelolaan, namun setelah adanya kepentingan dari tiap *stakeholder* dan dengan memiliki tujuan bersama dari tiap *stakeholder* yang terkait, Bukit Sakura Lawu menjadi terstruktur dan jelas akan fungsi nya sebagai hutan penyangga di lereng Gunung Lawu.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini mengusung judul tentang “*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Bukit Sakura Lawu Kabupaten Karanganyar” Metode yang digunakan dalam studi ini menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus, studi kasus yaitu metode penelitian tentang suatu kasus yang setiap prosesnya dilakukan secara rinci, tajam, dan mendalam. Kasus di sini bisa berupa individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga. Dari penelitian kasus tersebut, diharapkan peneliti akan mendapatkan pengetahuan mendalam tentang kasus yang diteliti tersebut. sebagai dasar memahami gejala atau fenomena yang diteliti. (Rahardjo, 2017)

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subjek darimana data yang ada dilapangan itu di dapat, Dalam penelitian ini sumber data yang di gunakan oleh peneliti ada dua yaitu :

- a. *Data Primer*: Data *primer* merupakan data yang di dapat atau dikumpulkan oleh peneliti sebagai data utama dalam penelitian (Rahardjo, 2017) adapun data *primer* dalam penelitian ini adalah Kelompok Sadar Wisata Sakura Lawu, Lembaga Masyarakat Desa Hutan Lawu, MPA Singo Lawu, Tokoh Masyarakat Desa Tlogo Dringo, dan Perum Perhutani Semarang, pedagang Bukit Sakura Lawu
- b. *Data Sekunder*: Data *Sekunder* merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk data pendukung dari data primer dalam penelitian, data sekunder ini dikumpulkan oleh peneliti dari setiap karya tulis, termasuk buku, jurnal, dan esai penelitian, yang masih relevan dengan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian (Rahardjo, 2017).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dilakukan nantinya, di perlukan suatu tehnik atau cara yang digunakan untuk memperoleh data yang benar, maka cara yang dilakukandalam penelitianini adalah sebagai berikut:

a. Obsevasi

Observasi dalam penelitian kualitatif, merupakan suatu tehnik yang di gunakan untuk mengamati fenomena yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini, observasi yang akan di gunakan meliputi observasi analisis dokumen dan observasi analisis lapangan (Sujarweni, 2004)

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan mendapatkan data atau informasi yang berasal dari narasumber yang berada di lapangan. Menurut Galvin (Hansen, 2020) secara umum teknik wawancara dilaksanakan melalui enam

tahapan, yaitu: pertama mengidentifikasi permasalahan penelitian atau fenomena yang akan diteliti, kedua mengembangkan desain wawancara, ketiga melakukan wawancara terhadap narasumber, keempat transkripsi dan translasi, kelima analisis data wawancara, keenam pelaporan sesuai hasil wawancara. Teknik wawancara memiliki tiga tahapan analisis, pertama analisis isi (*content analysis*) yaitu, teknik untuk membuat kesimpulan valid dari isi suatu dokumen atau data. Kedua analisis pengkodean (*coding analysis*) yaitu, menekankan pada pengkodean dari data yang ada untuk mengidentifikasi pola-pola hubungan secara eksplisit maupun implisit, terakhir yaitu analisis wacana (*discourse analysis*) yaitu, melibatkan investigasi mendetail dari setiap pernyataan dan argumen yang diutarakan narasumber.

Melalui wawancara peneliti diharapkan dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipasi dalam memaknai situasi dan fenomena yang terjadi, dalam hal ini tidak dapat ditemukan melalui observasi. Dalam proses wawancara peneliti melakukan wawancara dengan informan secara langsung dengan mengunjungi tempat tinggal atau lokasi dimana informan berada. Peneliti akan melakukan tanya jawab kepada informan dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan tujuan penelitian dilakukan.

Tabel 1.1 Data Informan

No	Nama	Keterangan
1	Bapak Nuryono	Pokdarwis
2	Ibu Fufung	Pedagang BSL
3	Bapak Ali Mas'udin	Tokoh Masyarakat Desa Tlogo Dringo

4	Bapak Edi Mulyadi	Ketua MPA Singo Lawu
5	Bapak Nuryono	Ketua LMDH Lawu
6	Bapak Eko	Perhutani Semarang

Dalam penelitian ini pengambilan narasumber berdasarkan teknik *snowball sampling*, yaitu pengelola Bukit Sakura Lawu Tawangmangu, Masyarakat yang tinggal dan berjualan di daerah wisata Sakura Lawu, Masyarakat Peduli Api Kabupaten Karanganyar, Lembaga Masyarakat Desa Hutan Lawu, Tokoh Masyarakat Desa sekitar objek wisata, dan Perum Perhutani Semarang selaku penanggung jawab dari lahan Bukit Sakura Lawu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang nantinya akan di gunakan peneliti sebagai sarana pendukung dalam proses penelitian. Hasil wawancara dan observasi nantinya akan di sandingkan dengan dokumen atau berkas berkas yang dimiliki oleh informan dilapangan, sehingga dengan demikian, diharapkan substansi dalam penelitian ini akan lebih kuat dan lebih *kredibel*.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan bagian penting dalam penyajian bahan penelitian. Hal ini dikarenakan, analisis data merupakan proses pemilahan informasi yang didapatkan oleh peneliti dari hasil sumber data di lapangan. pengelolaan pariwisata bukit sakura lawu dalam prespektif teori *collaborative governance*

Menurut Miles dan Huberman yang di kutip oleh Emzir, analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga bagian yakni : *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Conclusion Drawing/Verivication* (Menyimpulkan dan Memverivikasi) (Emzir, 2016)

Data Reduction (Reduksi Data) merupakan pemilahan data-data yang di dapat dari informan dilapangan dengan cara merangkum, memilah

hal hal yang penting dan memfokuskan data data yang di dapat sesuai kebutuhan penelitian. Proses reduksi data dilakukan saat berada dilapangan sehingga dapat melakukan penggolongan, pemfokusan dan pembuangan data yang tidak perlu sehingga menghasilkan data yang lebih valid. (Emzir, 2016)

Data Display(Penyajian data) merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh peneliti gunamenyajikan data yang telah dipilah dalam bentuk tertentu, seperti narasi,bagan, matrik atau yang lain yang dianggap relevan untuk dimasukan kedalam pembahasan penelitian, sehingga mudah untuk melihat apa yang terjadi di lapangan dan memudahkan untuk mengambil kesimpulan. (Emzir, 2016)

Concluding Drawing/Verivication (Menyimpulkan dan Memverivikasi) merupakan langkah terakhir dalam analisis data, yang dimana peneliti akan menarik kesimpulan dari serangkaian tahap yang telah dilakukan.Tentu saja kesimpulan ini harus di dukung dengan bukti-bukti yang kuat sehingga memunculkan narasi penelitian yang kuat, valid serta kredibel. (Emzir, 2016)

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan adalah Format penulisan yang memuat rangkaian dalam struktur bab dan sub bab dalam penyusunan penelitian. Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari enam bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I, dalam bab ini akan memuat tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang menjadi focus kajian penelitian, rumusan masalah sebagai bagian yang menjadi pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian sebagai informasi tentang tujuan dilakukan penelitian dan manfaat yang diambil dari penelitian ini untuk penelitian yang akan datang, tinjauan pustaka (penelusuran penelitian terdahulu) dimana dalam

hal ini, dilakukan untuk membandingkan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, dan metode penelitian yang berfungsi sebagai petunjuk peneliti dalam melakukan penelitian ini.

BAB II berisi tentang kerangka teori, dalam bab ini peneliti akan mengulas teori-teori yang akan di gunakan dalam menganalisis kejadian yang ada dilapangan yang berkaitan dengan *collaborative governance* dalam pengelolaan objek wisata alam di Kabupaten Karanganyar dengan teori *Collaborative Governance* Ansel dan Gash.

BAB III dalam bab ini akan menguraikan gambaran umum dari objek penelitian yang ada, gambaran umum ini terdiri dari kondisi geografis, kondisi topografi, kondisi sosial, kondisi politik, kondisi ekonomi di Kabupaten Karanganyar, profil Bukit Sakura Lawu, potensi Bukit Sakura Lawu, kebudayaan Bukit Sakura Lawu.

BAB IV berisi tentang analisis dan uraian data yang di dapat, dimana peneliti akan menganalisis serta menguraikan data mengenai siapa saja *stakeholder* yang terlibat dan bagaimana perannya dalam pengelolaan di Bukit Sakura Lawu

BAB V berisi tentang analisis dan uraian data yang didapat, dimana peneliti akan menganalisis serta menguraikan data mengenai interaksi atau relasi yang dilakukan oleh *stakeholder* yang memiliki kepentingan dalam melakukan kerjasama pengelolaan Bukit Sakura Lawu

BAB VI bab ini penutup berupa kesimpulan yang diambil dari serangkaian proses penelitian, serta saran terhadap problematika yang terjadi dimasyarakat terkait *Collaborative Governance* dalam pengelolaan di Bukit Sakura Lawu.

BAB II

GOVERNANCE DAN COLLABORATIVE GOVERNANCE

Pembahasan pada Bab II ini akan menjelaskan tentang landasan teoritik yang digunakan oleh penulis untuk membantu menganalisis pengumpulan data dan menganalisis data dilapangan untuk mendapatkan hasil jawaban dari pertanyaan penelitian. Sehingga di dalam bab II akan menjelaskan beberapa bagian penting mengenai *Collaborative Governance*, dan Proses *Collaborative Governance*. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Teori Collaborative Governance* Ansel dan Gash. Konsep teori serta bagian-bagian dari landasan teori yang akan digunakan oleh peneliti akan di jelaskan sebagai berikut.

A. Konsep *Governance*

1. Sejarah konsep *Governance*

Dalam perspektif hirtoris, konsep *Governance* bukan lah suatu istilah yang baru, istilah *governance* pertama kali di kenalkan di Perancis pada abad IV pada tahun 1399 pada masa pemerintahan Raja Henry. Pada masa itu konsep *governance* dipahami dengan istilah “pemerinta pusat”. Istilah ini menjadi lebih populer ketika Bank Dunia mulai memperkenalkan kembali pada tahun 1989. Pada saat itu Bank Dunia mengisyaratkan bahwa keyakinan pada kesejahteraan ekonomi tidak akan terwujud tanpa aturan hukum dan demokrasi. Menurut Chotray and Stoker melihat bahwa perkembangan konsep *governance* dari tiga dekade terakhir yaitu, yang pertama perkembangan dan derajat globalisasi, dan yang kedua penyebaran institusi dasar dari demokrasi (Haris, 2019).

Munculnya konsep *Governance* dipengaruhi juga oleh mereka yang mendukung pasar dan ingin pemerintah memainkan peran yang lebih kecil, sehingga negara tidak dapat terlibat secara lebih luas dalam tata kelola pemerintahan. Namun, hal ini menimbulkan konflik antara pemerintahan dan masyarakat yang dinilai justru tidak adil. Keadaan anti *governance* adalah kondisi atau era yang menggambarkan turunnya tingkat kepercayaan public terhadap pemerintahan. Ruang lingkup dari konsep *governance* akhirnya disepakati mencakup dari berbagai hal, yaitu pemerintahan, seperti prosedur pengambilan

keputusan kebijakan yang lebih strategis, yang kedua pemerintahan ekonomi, yaitu mencakup fasilitas kegiatan per ekonomian untuk mencapai keadilan, memberantas kemiskinan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, ruang lingkup yang terakhir yaitu pemerintahan administratif mengacu pada system pelaksanaan kebijakan (Anjali, 2022).

Perkembangan *Governance* sejalan dengan perkembangan *new public management*. Konsep *new public management* adalah sebuah konsep untuk penyelesaian administrasi public, konsep ini berorientasi pada perubahan untuk meningkatkan kinerja sektor public. Pada dasarnya kedua konsep ini diterapkan mulai dari dekade 1970 atau awal tahun 1980-an. Prinsip *good governance* memiliki tujuan untuk menerapkan nilai-nilai manajemen sektor swasta, manajemen sektor publik, hal tersebut untuk memudahkan suatu organisasi atau lembaga dalam mencapai tujuannya (Susanto, Yusuf, & Rachmawati, 2019).

2. Pengertian *Governance*

Governance merupakan sebuah aktivitas atau kondisi dalam melaksanakan pemerintahan yang melibatkan dari berbagai sektor mulai dari pemerintahan, masyarakat dan sekelompok orang atau swasta. Sehingga konsep *Governance* lebih memiliki cakupan yang luas dibandingkan dengan konsep *Government*. Pengertian *Governance* menurut Mardiasmo, menyatakan bahwa *Governance* adalah sebuah konsep pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada pembangunan sektor publik. Tujuan akhir yang akan dicapai dari konsep *governance* adalah peningkatan pembangunan dan kesejahteraan publik, dimana capaian ini akan terwujud jika institusi pemerintahan menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. *Governance* adalah sebuah konsep pengaturan kebijakan, pengaturan sistem dengan sebuah proses yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan (Dwiyanto, 2016).

Secara umum istilah *Governance* tidak terlepas dari istilah *Good Governance* yang artinya adalah pemerintahan yang baik, yaitu suatu penyelenggaraan pemerintahan yang terstruktur dalam hal manajemen,

pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi yang efisien. Sedangkan menurut Ganie (Darmawan & Nurrahmi, 2020) *good governance* adalah pengelolaan sumber daya yang melibatkan sektor negara dan non-negara di dalam sebuah prosesnya. Keterlibatan dari kedua pihak tersebut menimbulkan suatu kolaborasi yang cukup efisien karena dilakukan secara menyeluruh.

Jika dilihat dari beberapa definisi *good governance* dari beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, serta melibatkan dari beberapa sektor yaitu mulai dari tingkat pemerintahan, non-pemerintahan dan swasta. *Good governance* memiliki tujuan untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dan bertanggung jawab.

3. Pergeseran Paradigma *Governance*

Konsep *governance* merupakan sebuah paradigma baru yang berasal dari kata pemerintah. Istilah "pemerintah" menagacu pada entitas atau organisasi yang memiliki otoritas atas pemerintahan. *Government* hanya menangani permasalahan seputar pemerintahan saja, sehingga hal ini dinilai kurang efisien. Oleh karena itu, istilah memerintah memiliki arti memainkan peran yang lebih besar, dan konsep pemerintahan yang terdiri dari prosedur untuk menangani permasalahan baik dari sektor pemerintahan hingga masyarakat. Leach dan Percy dalam Hetifah (2019) menyatakan perbedaan dari dua konsep tersebut, yaitu *government* mengandung pengertian politisi dan pemerintahan yang mengatur, melakukan sesuatu dan memberikan pelayanan, sementara itu sisi lain dari pemerintahan bersifat pasif. Penggunaan konsep *governance* menyatukan seluruh elemen agar ikut bersifat aktif dalam pengelolaan sebuah tata pemerintahan.

Berdasarkan perbedaan makna dari dua konsep diatas maka dapat disimpulkan bahwa konsep *Governance* bertujuan untuk menambah cakupan yang lebih luas dari konsep sebelumnya yaitu konsep *government*. Dari perkembangan inilah diharapkan dapat membantu berjalannya suatu tata kelola pemerintahan yang

lebih baik, karena pada konsep *governance* memberikan ruang pada pihak non-pemerintahan, sehingga dalam berjalannya suatu proses demokrasi tidak hanya pemerintahan saja yang berperan di dalamnya. Sumber daya yang di kelola juga akan lebih merata dengan menggunakan konsep *governance* karena tidak ada elemen yang bersifat pasif.

Rosidi dan Fajriani (Rosidi , 2019) memetakan proses *governance* terdapat tiga aktor yang berpengaruh yakni, pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam menyelenggarakan pemerintahan, melainkan memerlukan aktor lain dalam perkembangannya. Pihak swasta dengan dukungannya memberikan bantuan kepada pemerintahan, akan tetapi tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi. Selain itu, masyarakat ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta untuk meningkatkan kualitas masyarakat ke depannya.

B. Collaborative Governance

1. Pengertian Collaborative Governance

Collaborative Government merupakan sebuah hubungan antar *stakeholder*, dan bagaimana keterlibatan *stakeholder* di dalam sebuah proses. Menurut Ansel (2007) tiap aktor yang terlibat perlu mengakui legitimasi yang dimiliki oleh aktor lain, setelah para aktor berkomitmen untuk berkolaborasi maka perlu dibangun rasa kepemilikan bersama kepada aktor terhadap setiap proses kolaborasi. Berdasarkan pendapat dari berbagai ahli *Collaborative Government* merupakan proses dari struktur jejaring multiorganisasi lintas yang membuat kesepakatan bersama, keputusan bersama, pencapaian consensus melalui interaksi formal maupun informal, serta pembuatan dan pengembangan norma-norma dalam interaksi yang bersifat saling menguntungkan dalam pencapaian tujuan bersama.

Collaborative Government merupakan forum yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, dimana melibatkan banyak *stakeholder* di dalamnya yang memiliki tujuan masing-masing. Dengan adanya sistem *Collaborative Government*. Donahue dan Zeckhauser (Ansel & Gash, 2007) mengungkapkan bahwa

collaborative government merupakan kondisi dimana pemerintah berusaha untuk memenuhi tujuan public melalui kolaborasi antar organisasi maupun individu. Hal demikian diungkapkan Holzer et al (Ansel & Gash, 2007) yang menyatakan bahwa *collaborative governance* adalah kondisi ketika pemerintah dan swasta berupaya mencapai suatu tujuan bersama masyarakat.

Dari beberapa definisi *Collaborative Governance* menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* merupakan suatu proses kolaborasi yang melibatkan beberapa *stakeholder* di dalam nya, baik dari pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat. *Collaborative Governance* memiliki tujuan untuk mewujudkan sebuah tujuan bersama dengan menghasilkan keuntungan bersama tanpa adanya kerugian yang lebih besar dari modal. *Stakeholder* yang tergabung dalam suatu kolaborasi pada dasarnya memiliki tujuan masing-masing, akan tetapi bersama untuk menyatukan suatu tujuan tersebut menjadi satu tujuan bersama dengan cara musyawarah.

2. Perkembangan *Collaborative Governance*

Sejak tahun 1990-an konsep *collaborative governance* mulai dikembangkan sebagai paradigma baru untuk menghadapi isu-isu yang beragam di masyarakat. Pada perkembangan lebih luas (Ansel & Gash, 2007) memahami secara komprehensif tentang *collaborative governance*, sehingga melakukan sebuah studi meta-analisis terhadap 137 kasus mengenai *collaborative governance*. Hasil dari studi tersebut disimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu tata kelola yang mengatur satu atau lebih lembaga yang terlibat secara langsung. Sebenarnya dalam perkembangan teori *collaborative governance* ini lebih mudah karena telah diberi arahan tentang perlunya transisi dari pemerintahan untuk lebih cepat dalam mengelola perubahan yang terjadi di masyarakat (Zaenuri, 2018).

Perkembangan teori *Collaborative Governance* kemudian berkembang seiring waktu dengan dinamika konflik yang semakin kompleks di suatu organisasi yang melibatkan berbagai *stakeholder*, seperti pihak pemerintahan, non-pemerintahan serta masyarakat. Selain itu, berkaca dari teori-teori sebelumnya yang hanya mengandalkan pemerintah dalam penyelesaian masalah, dimana kondisi saat

ini pemerintah juga memiliki keterbatasan waktu dalam menangani suatu permasalahan tersebut, sehingga membutuhkan kolaborasi dari *stakeholder eksternal*.

Ansel dan Gash (2007) menyebutkan bahwa *collaborative governance* sebagai sebuah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat beragam kebijakan dan berkumpul di satu forum untuk menerapkan kebijakan tersebut. Perkembangan teori ini dinilai lebih efisien karena dapat melibatkan seluruh *stakeholder* yang berkaitan di dalamnya dan dapat mewujudkan tujuan bersama. Kolaborasi antar *stakeholder* dapat terjadi karena adanya keinginan, mereka menyadari akan keterbatasan yang mereka miliki, sehingga *stakeholder* memiliki kesepakatan untuk bekerjasama dan berkomitmen bersama.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli terjadinya perkembangan teori *collaborative governance* dapat disimpulkan bahwa teori tersebut merupakan sebuah proses dari struktur jejaring multi organisasi lintas sektoral yang membuat keputusan bersama, kesepakatan bersama, pencapaian konsensus melalui interaksi formal maupun informal, serta pembuatan dan pengembangan norma-norma dalam interaksi yang bersifat saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu di dalam *collaborative governance* kolaborasi antara *stakeholder* yang terjadi bersifat *egaliter*, yaitu seluruh aktor memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut kemudian menciptakan suatu kondisi di mana antar *stakeholder* merasa memiliki peluang yang sama, dan tujuan yang sama. (Nuryana, 2019)

Selanjutnya, peneliti menggunakan teori *Collaborative Governance* Ansel Dan Gash untuk membantu menjawab bagaimana peran *stakeholder* dalam pengelolaan Objek Wisata Bukit Sakura Lawu, dan bagaimana relasi antar *stakeholder* dalam pengelolaan Objek Wisata Bukit Sakura Lawu Kabupaten Karanganyar. Dengan menggunakan proses kolaborasi menurut Ansel dan Gash serta enam elemen penting yang ditekankan Ansel dan Gash dalam teorinya.

3. Teori *Collaborative Governance* Anshel & Gash

Pada penelitian ini untuk membantu dalam menganalisis data-data di lapangan peneliti menggunakan teori *Collaborative Government* dari Anshel dan Gash. Menurut Ansel dan Gash (2007) memaparkan bahwa *Collaborative Governance* merupakan sebuah strategi dalam tatakelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama. Ansel dan Gash selanjutnya mendefinisikan *collaborative governance* sebagai sebuah aransemen tatakelola pemerintahan yang mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan aktor non-pemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan konsultatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan public, mengelola program atau asset publik.

Ansel dan Gash dalam teorinya terkait *Collaborative Governance* menekankan enam elemen penting, Enam elemen penting yang ditekankan dalam definisi ini, yaitu: 1) forum dimulai oleh badan atau lembaga publik, 2) aktor non-negara berpartisipasi, 3) peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan daripada hanya "berkonsultasi" dengan badan publik, 4) forum dibentuk secara formal dan bertemu bersama, 5) forum bertujuan untuk membuat keputusan berdasarkan konsensus (walaupun dalam praktiknya tidak tercapai konsensus), dan 6) fokus kolaborasi adalah pada manajemen atau kebijakan publik. Enam elemen penting yang ditekankan oleh Ansel dan Gash tersebut merupakan faktor penting dalam berjalannya proses kolaborasi.

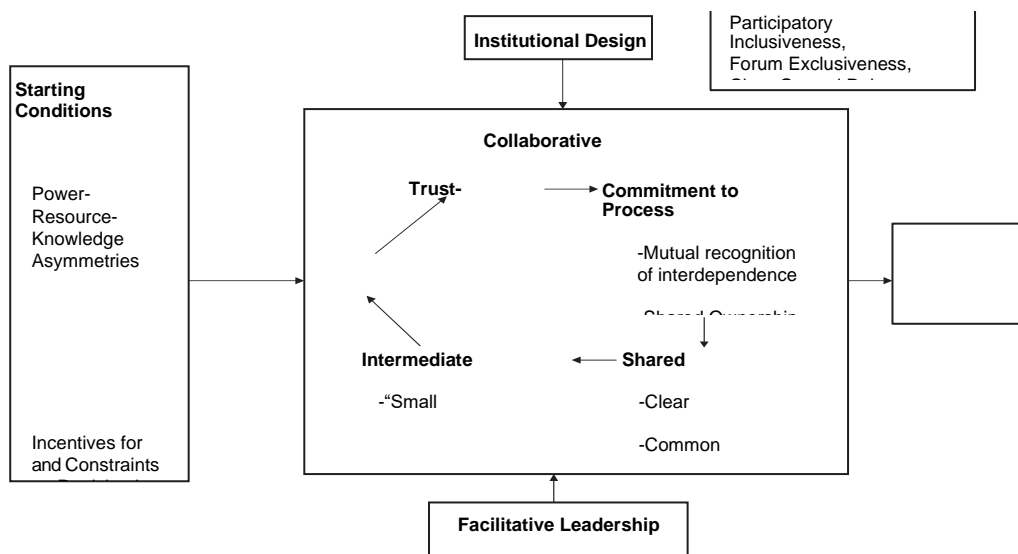
Salah satu komponen penting dari istilah tata kelola kolaboratif adalah tata kelola, misalnya, Lynn, Heinrich, dan Hill (Sasongko, 2018) menafsirkan tata kelola secara luas sebagai "rezim hukum, peraturan, keputusan pengadilan, dan praktik administrasi yang membatasi, menentukan, dan memungkinkan penyediaan barang dan jasa yang didukung publik". Definisi ini memberi ruang bagi struktur pemerintahan tradisional serta bentuk badan pembuat keputusan publik atau swasta yang muncul. Aturan dan bentuk yang mengarahkan pengambilan keputusan independen dapat diambil sebagai definisi dasar tata

kelola. Penekanan ditempatkan pada pengambilan keputusan kolektif, maka tata kelola bukan tentang satu orang yang membuat keputusan; melainkan tentang kelompok orang, organisasi, atau sistem organisasi yang membuat keputusan.

Pengambilan keputusan secara kolektif tersebut berkonsentrasi pada publik untuk memisahkan tata kelola kolaboratif dari metode pengambilan keputusan konsensus lainnya seperti *mediasi transformatif* atau penyelesaian sengketa alternatif. Terlepas dari kenyataan bahwa organisasi dapat menggunakan penyelesaian sengketa atau mediasi untuk mengurangi perselisihan politik atau sosial, perselisihan pribadi seringkali menjadi fokus dari strategi ini. Selain itu, kemungkinan penyelesaian sengketa publik atau mediasi hanya akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa pribadi.

4. Proses Collaborative Governance

Gambar 2.1 proses *collaborative governance*



Sumber : Ansel dan Gash (2007, hal 550)

Bagan diatas merupakan sebuah proses kolaborasi menurut Ansel dan Gash dalam kacamata proses terjadinya kolaborasi dari beberapa *stakeholder*, mulai dari (*starting conditions*) atau kondisi awal, (*collaborative process*) proses kolaborasi dan (*outcomes*) hasil akhir. (Chrish, Ansell; Alison, Gash;, 2007).

1. Kondisi Mulai/Kondisi Awal

Menurut penelitian yang telah dilakukan, keadaan yang ada pada awal kerjasama dapat mempermudah atau mempersulit pemangku kepentingan dan lembaga serta pemangku kepentingan untuk bekerja sama. Dua titik awal yang sangat berbeda adalah bayangan pertama dan terpenting, para pemangku kepentingan memiliki sejarah perbedaan pendapat yang sengit atas isu-isu lokal yang bermuatan emosional dan memandang satu sama lain sebagai antagonis yang tidak bermoral. Pemangku kepentingan, di sisi lain, berbagi visi tentang apa yang ingin mereka capai melalui kolaborasi dan memiliki rekam jejak untuk bekerja sama dan memperlakukan satu sama lain dengan rasa hormat. Kolaborasi mungkin menantang dalam skenario mana pun, akan tetapi pertama yang harus diselesaikan adalah mengatasi masalah ketidakpercayaan, rasa tidak hormat, dan permusuhan langsung. Ansel dan Gash fokus pada tiga variabel utama untuk baseline kritis: perbedaan antara sumber daya atau kekuatan berbagai pemangku kepentingan, insentif mereka untuk berkolaborasi, dan konflik atau sejarah kerjasama mereka di masa lalu.

Di dalam proses kondisi awal terdapat tiga tahap di dalamnya, yaitu ketidakeimbangan daya pengetahuan/asimetris, insentif untuk kendala pada partisipatif, dan prasejarah dari kerjasama atau konflik kondisi awal.

a. Ketidakeimbangan Daya/Sumber Daya

Ketidakeimbangan kekuatan antara pemangku kepentingan sering disebut sebagai masalah. Gray, (dalam Ansel & Gash) mengatakan bahwa proses tata kelola kolaboratif akan rentan manipulasi oleh aktor yang lebih kuat jika beberapa pemangku kepentingan tidak memiliki kapasitas, organisasi, status, atau sumber daya untuk berpartisipasi. Misalnya, Bradford (Ansel dan Gash 2007) menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Ontario untuk membuat kebijakan pelatihan kerja dan kesehatan dan keselamatan kerjamelalui sarana kolaboratif digagalkan oleh status istimewa perusahaan yang, melalui saluran informal, dapat memperoleh keuntungan. akses ke pejabat senior. Kelompok lingkungan Amerika sangat skeptis tentang tata kelola kolaboratif karena

mereka merasa bahwa hal itu menguntungkan kelompok industri (Ansel & Gash, 2007).

Dalam hal teori *kontingensi* tata kelola kolaboratif, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1.) Jika ada ketidakseimbangan kekuatan atau sumber daya yang cukup besar di seluruh pihak dapat mencegah partisipasi *stakeholder* dengan cara yang berarti.
 - 2.) Insentif untuk Berpartisipasi. Mengingat sifat partisipasi yang sebagian besar bersifat sukarela, penting untuk mengetahui keinginan yang dimiliki pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam tata kelola kolaboratif, termasuk analisis insentif bagi lembaga publik untuk mensponsori tata kelola kolaboratif.
 - 3.) Sarjana tata kelola kolaboratif telah mengakui bahwa ketidakseimbangan kekuasaan dan sumber daya akan mempengaruhi insentif kelompok untuk berpartisipasi dalam proses kolaboratif Imperial. Oleh karena itu, Gray (dalam Ansel dan Gash) berpendapat bahwa pertimbangan waktu akan menjadi penting bagi pihak-pihak yang percaya bahwa kekuatan mereka sedang meningkat tidak mungkin mau mengikat diri pada kolaborasi.
 - 4.) Insentif untuk berpartisipasi tergantung berdasarkan harapan pemangku kepentingan bahwa pendekatan kolaboratif akan memberikan manfaat yang signifikan, mengingat keseimbangan waktu dan upaya yang diperlukan untuk kolaborasi. Ketika pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi hubungan yang jelas antara keterlibatan maka insentif berpartisipasi akan meningkat.
 - 5.) Keterlibatan pemangku kepentingan seringkali bersifat opsional, terlepas dari kemungkinan bahwa badan legislatif memberlakukan metode kolaboratif.
- b. Insentif untuk kendala pada partisipatif

Insentif untuk berpartisipasi dalam tata kelola kolaboratif juga akan tumbuh jika para pemangku kepentingan percaya bahwa tujuan mereka telah tercapai. Misalnya, prevalensi tata kelola kolaboratif merupakan sebuah struktur dari pengambilan keputusan kebijakan, dalam perselisihan pengelolaan sumber daya lokal mungkin terkait dengan ketergantungan bersama kelompok-kelompok lokal pada sumber daya bersama. Implikasi dari saling ketergantungan ini terkadang berlawanan dengan intuisi dari partisipator (Prasetyo, Utami, & Amanda, 2021).

Partisipator merupakan sebuah kunci organisasi maupun proses kolaborasi, dengan demikian penting untuk memahami kepentingan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses kolaborasi dan faktor-faktor yang membentuk insentif tersebut, terutama terhadap berartinya waktu dan energi yang dibutuhkan selama proses kolaborasi. Insentif tata kelola kolaborasi juga meningkat jika pemangku kepentingan bekerja sama dengan baik dengan pemangku kepentingan lainnya (Prasetyo, Utami, & Amanda, 2021).

Pada dasarnya pemangku kepentingan harus mempunyai sinergi yang sama untuk memajukan sebuah tempat pariwisata karena implikasi dari saling ketergantungan ini terkadang berlawanan dengan intuisi. Persepsi saling ketergantungan, tentu saja seringkali berkaitan dengan konteks politik, yaitu insentif untuk berpartisipasi dibentuk oleh bayangan Negara, seperti ancaman regulasi atau pengadilan.

c. Prasejarah dari kerjasama atau konflik kondisi awal

Weber (Ansel & Gash, 2007) menyatakan bahwa prasejarah antagonism atau konflik kondisi awal antara pemangku kepentingan dapat menghambat atau memfasilitasi sebuah proses kerja sama, hal itu dibuktikan dengan kepentingan apa yang dibawa oleh masing-masing pemangku kepentingan pada kondisi awal. Tata kelola kolaboratif bagaimanapun dibangun atas dasar sejarah yang mendalam dari setiap instansi atau

kelembagaan, proses tata kelola kolaboratif merupakan pembuktian dari setiap lini untuk mencapai tujuan tertentu.

Di sisi lain sejarah kerjasama masa lalu yang sukses dapat menciptakan modal sosial dan tingkat kepercayaan yang tinggi dan menghasilkan siklus kolaborasi yang baik, oleh karena itu Ansel dan Gash menyarankan dua kemungkinan berikut: (Ansel & Gash, 2007)

- 1.) Jika ada prasejarah antagonisme diantara para pemangku kepentingan, maka tata kelola kolaboratif tidak mungkin berhasil kecuali ada tingkat saling ketergantungan yang tinggi antar pemangku kepentingan.
- 2.) Langkah-langkah positif untuk memulihkan karena adanya tingkat kepercayaan dan modal sosial diantara para pemangku kepentingan.

2. Kepemimpinan Fasilitatif

Literatur menemukan bahwa melibatkan pemangku kepentingan membutuhkan kepemimpinan yang fasilitatif. Pernyataan tersebut diungkapkan Chrislip dan Larson; Ozawa; Pine, Warsh, dan Maluccio; Reilly; Susskind dan Cruikshank dalam Ansel dan Gash (2007). Karena pentingnya kehadiran kepemimpinan dalam sebuah lembaga maka perlu adanya fasilitator atau fasilitas untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga dalam berjalannya proses kolaborasi fasilitator mengantarkan kepada bentuk kepemimpinan yang baik, fasilitator disini bisa disebutkan sebagai seseorang yang menjadi pemangku kepentingan. (Ansel & Gash:2007)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin harusnya bisa berlaku adil membawa sebuah organisasi dengan sifat seorang pemimpin yang bijaksana. Ozawa dalam Ansel dan Gash (2007), misalnya menjelaskan apa yang dia sebut sebagai teknik "*transformatif*" dimana prosedur mediasi membantu mewujudkan "keseimbangan kekuatan" diantara para pemangku kepentingan. Menggunakan

pendekatan kepemimpinan fasilitatif juga mendorong para pihak untuk mempertimbangkan potensi sinergi.

Konteks peran kepemimpinan sebagai pengaruh proses kolaborasi ini semakin tinggi jika pemangku kepentingan tidak dapat berlaku dengan baik, maka pemimpin harus bertindak sebagai perantara yang jujur, sigap dan baik dalam menyelesaikan permasalahannya. Terkadang ada ketegangan antara peran netralitas dan peran persuasi. Ketika konflik tinggi, peran yang jujur seringkali diberikan kepada mediator luar yang tampaknya tidak memiliki kepentingan terhadap hasilnya. Namun, mediator luar mungkin juga memiliki sedikit pengaruh dengan berbagai pemangku kepentingan. Sikap jujur yang tetap di junjung tinggi oleh pemimpin di tengah keributan para pemangku kepentingan akan membuahkan hasil yang maksimal dalam proses kolaborasi (Ansel:2007).

3. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merupakan aspek landasan dalam proses kolaborasi, Aspek tersebut berkaitan dengan siapa saja yang akan berada di dalam proses kolaborasi. Kelompok yang dipilih adalah mereka yang merasa bahwa memiliki kesempatan dan siap berkolaborasi untuk kepentingan bersama. Seperti pernyataan Chrisli dan Larson (Ansel dan Gash, 2007), sebagai persyaratan pertama yaitu, kerja sama yang baik melibatkan semua pihak yang terpengaruh oleh masalah tersebut.

Desain kelembagaan yang di bentuk harus jelas dan terstruktur. Namun seperti yang kita lihat sebelumnya, pemangku kepentingan mungkin tidak memiliki insentif untuk berpartisipasi, terutama jika mereka melihat tempat alternatif untuk mewujudkan agenda mereka.

4. Proses Kolaborasi

Menurut paradigma proses tata kelola kolaboratif, kerjasama terjadi secara bertahap. Metode tiga langkah dijelaskan oleh Gray dalam Ansel dan Gash(2007); 1) pemecahan masalah, 2) penetapan tujuan, dan 3)melaksanakan Langkah-langkah yang diakui. Proses kolaborasi menurut Ansel dan Gash terdapat 4 tahapan, tahapan

pertama yaitu dialog tatap muka, kedua hasil menengah, tahap ketiga komitmen terhadap proses dan tahap yang terakhir pemahaman bersama.

a. Tahap dialog tatap muka

Semua proses kolaborasi diawali dengan tahapan tatap muka, hal ini dilakukan guna untuk menyatukan kepentingan dari berbagai pihak demi tujuan bersama, dialog tatap muka dilakukan di awal karena agar tidak terjadi kesalahpahaman atau ketimpangan nantinya di dalam proses kolaborasi berjalan. Dialog tatap muka berlaku bagi pemangku kepentingan demi keuntungan bersama. Hal ini adalah inti dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses. Namun tidak semua menganggap bahwa dialog tatap muka merupakan hal yang positif dan harus dilakukan di awal proses kolaborasi, adapula yang menganggap bahwa dialog tatap muka merupakan stereotip negatif karena dapat menimbulkan kubu di antara pemangku kepentingan yang memiliki ego tinggi. Karena membangun kepercayaan merupakan aspek yang paling menonjol dalam sebuah proses kolaborasi dan cukup sulit dikembangkan. (Ansel dan Gash, 2007).

b. Tahap Komitmen terhadap proses

Komitmen terhadap proses merupakan variabel penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dari suatu proses kolaborasi. Keberhasilan merupakan tujuan bersama, akan tetapi ditengah berjalannya proses tidak terlepas dari kegagalan yang menyertai. Dalam survei kelompok kolaboratif Amerika dan Australia, Margerum dalam Ansel dan Gash (2007) menemukan bahwa "komitmen anggota" adalah faktor yang paling penting dalam memfasilitasi kolaborasi. Para pemangku kepentingan ikut serta dalam berkomitmen terhadap proses, mereka memastikan bahwa argumen nya tidak diabaikan dan untuk mengamankan legitimasi nya sebagai kewajiban dalam bentuk hukum. Hal itu merupakan bentuk komitmen para pemangku kepentingan dalam sebuah proses kolaborasi.

Komitmen juga menimbulkan dinamika yang cukup rumit bagi para *stakeholder* yang melakukannya, karena kebutuhan komitmen membuat mereka

harus mematuhi hasil musyawarah bersama meskipun bertentangan dengan pemangku kepentingan. Mempercayai pemangku kepentingan lain untuk menghormati sudut pandang dan kepentingan mereka merupakan prasyarat untuk komitmen. Dimensi tambahan dari komitmen disebut “kepemilikan proses”. Kepemilikan proses mengartikan bahwa dalam sebuah proses jika terjadi permusuhan, pemangku kepentingan non negara berlaku sebagai pengamat luar dalam pengambilan keputusan. (Ansel&Gash, 2007)

Saling ketergantungan pemangku kepentingan yang tinggi cenderung meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi, tetapi juga dapat meningkatkan insentif untuk bertindak secara manipulatif, akan tetapi kolaborasi bukanlah kesepakatan satu kali, namun bergantung padakerja sama yang berkelanjutan.

c. Tahap pemahaman bersama

Pemangku kepentingan dalam proses kolaboratif perlu mencapai konsensus tentang apa yang mungkin mereka capai bersama. Crowther, dan O'Hara dalam Ansel dan Gash (2007) menyatakan bahwa pemahaman bersama bertujuan untuk menyatukan kepentingan dari berbagai lini demi terwujudnya keuntungan bersama, peran pemimpin sangat penting dalam hal ini karena menentukan titik tengah bersama tanpa ada nya ketidakadilan yang akan menimbulkan perpecahan. Pemahaman bersama mempunyai tujuan bersama dan ideologi bersama, Pemahaman bersama mengisyaratkan bahwa pemikiran dan kepentingan dari berbagai sumber atau setiap lini harus disamakan sesuai tujuan bersama.

d. Hasil menengah

Penemuan fakta bersama adalah jenis hasil antara yang disebutkan sejumlah penulis secara positif. Ansel dan Gash (2007) juga mencatat argumen Vangen dan Huxham, bahwa dengan mencapai kemenangan bukan pendekatan terbaik untuk mencapai kepercayaan ketika para pemangku kepentingan memiliki tujuan yang lebih tinggi, sehingga tidak dapat memunculkan hasil menengah. Mereka berpendapat bahwa dalam situasi ini, kepercayaan dapat dibangun dengan eksplorasi awal bersama atas keseluruhan nilai kolaborasi.

5. Kesimpulan : waktu, kepercayaan, dan ketergantungan

Istilah tata kelola kolaboratif dikenal dengan menjanjikan imbalan yang manis, yang berarti bahwa proses di dalamnya tentu akan membuahkan hasil yang maksimal, akan tetapi tidak dapat dihindari pulan dinamika masalah yang terjadi selama proses tersebut berlangsung. Hal tersebut senada dengan penelitian Ansel dan Gash dalam penelitian ini adalah untuk menyatukan temuan positif dan negatif ke dalam kerangka analisis umum yang dapat mulai menentukan kondisi di mana kami dapat mengharapkan tata kelola kolaboratif untuk bekerja (setidaknya dalam hal "hasil proses") dan di mana kita mungkin berharap kepada pemangku kepentingan. Kami menganggap artikel ini menawarkan "teori" kontingensi dalam arti bahwa ia menawarkan kerangka kerja untuk mengatur serangkaian proposisi kontinjensi dan hubungan sebab-akibat. Klaim kami bukanlah bahwa ini adalah rangkaian proposisi atau hubungan kausal yang lengkap atau sepenuhnya dikerjakan, melainkan bahwa ini memberikan dasar untuk pengujian *empiris* dan *elaborasi* teori lebih lanjut.

Banyak studi yang mencatat bahwa tata kelola kolaboratif adalah sebuah proses yang memakan waktu, akan tetapi hal tersebut bisa berubah jika tingkat kepercayaan yang cukup tinggi dapat membuat waktu berproses

lebih signifikan, hal tersebut terjadi setelah pemangku kepentingan mencapai konsensus kerja, literature menunjukkan bahwa implementasi dapat terjadi cukup cepat. Ansel dan Gash (2007) menemukan bahwa situasi konflik yang tinggi ditandai dengan rendahnya kepercayaan masih dapat dikelola secara kolaboratif jika pemangku kepentingan saling betergantungan, karena sifat saling ketergantungan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi di dalamnya. Penting untuk diperhatikan bahwa kepercayaan dan saling ketergantungan sebagian bersifat endogen, keduanya dibentuk secara positif atau negatif oleh proses kolaboratif itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses kolaboratif sebagian merasa tidak saling tergantung. Namun melalui dialog dengan para pemangku kepentingan lainnya dan melalui pencapaian hasil antara

yang berhasil, dapat memperoleh pemahaman baru tentang hubungan *stakeholder* (Ansel dan Gash, 2007).

BAB III

POTRET KABUPATEN KARANGANYAR DAN OBJEK WISATA ALAM BUKIT SAKURA LAWU

A. POTRET KABUPATEN KARANGANYAR

1. Sejarah Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Sragen, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan (Jawa Timur), Kabupaten Wonogiri di selatan, Kabupaten Boyolali di barat, dan Kota Surakarta di timur. Kecamatan Colomadu merupakan salah satu kecamatan eksklaf di Kabupaten Karanganyar yang terletak di antara Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta. Pada tahun 1741–1757, pada masa konflik Raden Mas Said, pemerintahan desa kecil didirikan, dan ini adalah awal dari proses sejarah yang melahirkan Kabupaten Karanganyar. Raden Mas Said, juga dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa, mendirikan banyak tempat sebagai titik fokus perlawanan terhadap Belanda saat itu.

Pada tanggal 18 November 1917, Kanjeng Gusti Pangeran Arya Mangkunegara VII melantik KRMT. Hardjo Hasgoro sebagai Bupati Karanganyar. Pedukuhan di daerah ini adalah sumber dari nama Karanganyar, Raden Mas Said (Mangkunegara I) menamai situs ini setelah mendapat wahyu dari keraton yang berbentuk burung derkuku, disinilah Raden Mas Said menemukan kemantapan untuk kesepakatan baru (Jawa: Anyar) untuk memerintah. (Puspitasari, Andayani, & Hastuti, 2018).

2. Kondisi Geografis dan Demografi Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar menempati 77.378, 64 Ha atau 2,38% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Karanganyar secara administratif terbagi menjadi 17 kecamatan, yang meliputi 162 desa, 1.961 rukun tetangga, dan 6.473 rukun tetangga yang tersebar di 17 kecamatan. Kecamatan Tawangmangu memiliki luas 7.003, 16 Ha sehingga menjadi kecamatan terluas, sedangkan Kecamatan Colomadu memiliki luas 1.564, 17 Ha menjadi kecamatan terkecil; berikut pembagian wilayah administrasi Kabupaten Karanganyar:

Tabel 3.1 Pembagian wilayah administratif Kabupaten Karanganyar

No	Kecamatan	Luas wilayah	kelurahan	Desa	RW	RT
1	Jatipuro	4.036,50	0	10	150	305
2	Jatiyoso	6.716,49	0	9	120	286
3	Jumapolo	5.567,02	0	12	114	314
4	Jumantono	5.355,44	0	11	122	324
5	Matesih	2.626,63	0	9	124	327
6	Tawangmangu	7.003,16	3	7	101	347
7	Ngargoyoso	6.533,94	0	9	108	297
8	Karangpandan	3.411,08	0	11	122	300
9	Karanganyar	4.302,64	12	0	162	56
10	Tasikmadu	2.759,73	0	10	86	451
11	Jaten	2.554,81	0	8	114	584
12	Colomadu	1.564,17	0	11	119	519
13	Gondangrejo	5.679,95	0	13	119	507
14	Kebakramat	3.645,63	0	10	124	391
15	Mojogedang	5.330,90	0	13	159	467
16	Kerjo	4.682,27	0	10	91	279
17	Jenawi	5.608,28	0	9	61	213
Total		77.378,64	15	162	1.961	6.473

Sumber : SIPD Kabupaten Karanganyar, 2018

Dari tabel data diatas dapat disimpulkan bahwa wilayah terluas di Kabupaten Karanganyar merupakan Kecamatan Tawangmangu, yaitu seluas 7.003,16 Ha, dimana Kecamatan Tawangmangu merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian yaitu Objek Wisata Bukit Sakura Lawu Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.

Secara administratif, Kabupaten Karanganyar berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Sragen
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Magetan dan Ngawi
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta

3. Topografi Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar terletak pada ketinggian rata-rata 511 meter di atas permukaan laut. Kecamatan kebakramat memiliki elevasi paling rendah, kurang lebih 80 meter diatas permukaan laut (mdpl), sedangkan Kecamatan Tawangmangu memiliki elevasi paling tinggi, sekitar 2000 meter diatas permukaan laut. Pada Tabel 3.2 menunjukkan ketinggian masing-masing kecamatan.

Tabel 3.2 Ketinggian Wilayah di Kabupaten Karanganyar

No	Kecamatan	Ketinggian (mdpl)		
		Terendah	Tertinggi	Rata-rata
1	Jatipuro	500	1.200	770
2	Jatiyoso	800	1.550	950
3	Jumapolo	340	580	470
4	Jumantono	300	600	450

5	Matesih	380	750	450
6	Tawangamngu	800	2.000	1.200
7	Ngargoyoso	750	1.000	880
8	Karangpandan	450	650	500
9	Karanganyar	240	480	320
10	Tasikmadu	120	240	140
11	Jaten	90	105	98
12	Colomadu	130	150	140
13	Gondangrejo	140	170	150
14	Kebakramat	80	187	95
15	Mojogedang	380	500	403
16	Kerjo	380	520	450
17	Jenawi	410	1.500	750
	Kabupaten Karanganyar	80	2.000	511

Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar, 2018

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Karanganyar di dominasi dengan dataran tinggi dengan jumlah ketinggian rata-rata sebanyak 2.000 mdpl.

3.) Kondisi Sosial Kabupaten Karanganyar

Data penduduk Kabupaten Karanganyar menurut data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Karanganyar tahun 2013/2014 sebanyak 840.171 jiwa, terdiri dari 415.574 laki-laki dan 424.597 perempuan. Kecamatan Jenawi dengan jumlah penduduk 25.470 jiwa (3,03%) memiliki jumlah penduduk

paling sedikit, kecamatan dengan penduduk paling banyak adalah Kecamatan Jaten dengan jumlah 80,901 jiwa (9,63%). Rasio jenis kelamin perempuan sebesar 97,87 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Karanganyar lebih dominan perempuan daripada laki-laki (RPJMD Kabupaten Karanganyar).

Fasilitas sosial merupakan salah satu penunjang dalam berlangsungnya suatu kehidupan, fasilitas sosial yang memadai membuat masyarakat mendapatkan taraf hidup yang layak. Kabupaten Karanganyar memiliki beberapa fasilitas sosial di setiap kecamatan, guna memudahkan masyarakat dalam mengakses segala kebutuhan.

Tabel 3.3 Fasilitas sosial Kabupaten Karanganyar

No	Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK	Perguruan Tinggi	UPT PUSKE SMAS
1	Karanganyar	40	10	5	12	2	1
2	Jatipuro	29	3	1	2	0	1
3	Jatiyoso	27	4	0	0	0	1
4	Jumapolo	28	4	1	0	0	1
5	Jumantono	29	3	1	2	0	1
6	Matesih	29	5	1	0	0	1
7	Tawangmangu	31	5	0	1	1	1
8	Ngargoyoso	23	3	0	2	0	1
9	Karangpandan	27	7	2	1	1	1
10	Tasikmadu	26	3	0	3	1	1
11	Jaten	32	3	1	3	3	2

12	Colomadu	33	10	2	5	3	2
13	Gondangrejo	34	8	3	2	1	1
14	Kebakramat	31	6	1	1	0	2
15	Mojogedang	36	7	1	1	0	2
16	Kerjo	29	4	1	0	0	1
17	Jenawi	25	4	1	1	0	1

Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2021

Pada tabel III.3 diatas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas sosial Kabupaten Karanganyar, meliputi fasilitas pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas sudah cukup memadai, hanya saja ada beberapa kecamatan yang masih kurang dalam fasilitas pendidikan seperti Kecamatan Jatiyoso yang hanya memiliki fasilitas pendidikan hingga tingkat SMP. Fasilitas kesehatan berupa UTP Puskesmas sudah terdapat di setiap Kecamatan, ditambah dengan Puskesmas pembantu yang ada di setiap desa.

4.) Kondisi politik Kabupaten Karanganyar

Kondisi politik Kabupaten Karanganyar saat ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan, hal ini dapat dilihat dari upaya Kabupaten Karanganyar untuk melakukan pengembangan baik dari segi ekonomi, pembangunan, sosial dan lain-lain. Kabupaten Karanganyar di pimpin oleh Bupati dengan di dampingi Wakil Bupati beserta jajarannya. Kepemimpinan Kabupaten Karanganyar di bawah pimpinan Bapak Juliyatmono beserta wakilnya yaitu Bapak Rober Cristanto mulai dari periode tahun 2018 hingga sekarang. Kabupaten Karanganyar memiliki semboyan “**Tenteram**”, yang artinya yaitu Tenang, Teduh, Rapi, Aman, Makmur. Dengan semboyan tersebut menjadikan Kabupaten Karanganyar memiliki tujuan untuk jangka kedepannya. Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten yang dalam sistem politiknya sudah tertata

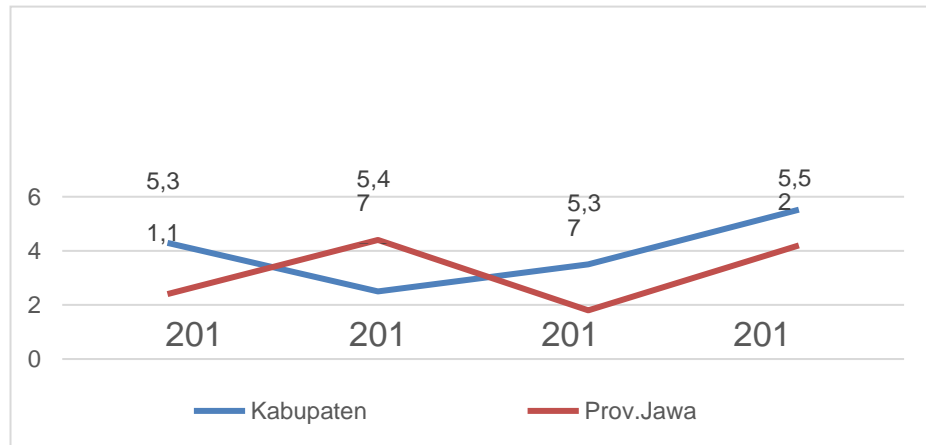
dengan baik, baik dalam hal administratif nya maupun dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023, pada tahun 2021 memuat arah kebijakan dan sasaran pokok Kabupaten Karanganyar mengusung tema "***Maju Berdaya Saing***" dan tujuan arah pembangunan "***pengembangan keunggulan desa dan kota untuk daya saing daerah dan melanjutkan pemerataan infrastruktur***". Sehingga dapat disimpulkan bahwa, dari dua tema tersebut yang dibawa oleh Bupati Karanganyar merupakan wujud dari kebangkitan Kabupaten Karanganyar menuju kabupaten yang maju dan dapat mensejahterakan masyarakatnya. (Rokhim, 2021)

5.) Kondisi Ekonomi Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan data yang diperoleh dari data BPS Kabupaten Karanganyar, bahwa setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Karanganyar memiliki pertumbuhan fasilitas sosial ekonomi yang berbeda dan dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda. Seperti pada Kecamatan Karanganyar yang berada pada pusat Kabupaten Karanganyar, sehingga dalam memiliki segi fasilitas maupun ekonomi yang lengkap dan memadai, namun hal ini berbanding dengan kecamatan yang berada jauh dari pusat kota yang memiliki fasilitas ekonomi kurang lengkap. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh keadaan alam serta akses jalan yang berbeda di setiap kecamatan. (Juliana, 2019).

Grafik III.4 perkembangan ekonomi Kabupaten Karanganyar



Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar, 2018

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan dalam kurun waktu selama 5 tahun, hal ini dibuktikan dengan hasil perekonomian selama tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2015 berkisar 5,05%. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 5,37%, dan data terakhir pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 5,52%. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat merupakan hasil dari upaya Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan pembangunan sehingga hal tersebut berdampak terhadap peningkatan pada sector ekonomi.

6.) Destinasi Objek Wisata Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten yang memiliki beberapa destinasi wisata, mulai dari wisata religi, wisata edukasi, wisata budaya, wisata Cagar alam, dan wisata alam. Dengan demikian Kabupaten Karanganyar memiliki julukan sebagai "**Bumi Intanpari**" yaitu istilah dari industri, pertanian dan pariwisata. (Diana, 2019).

Wisata religi yang terdapat di Kabupaten Karanganyar meliputi, pertama, Astana Mangadeg yaitu tempat Kanjeng Guati Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I atau Pangeran Sambernyawa dimakamkan. Kedua

yaitu Astana Girilayu terdapat makam raja-raja Mangkoenegaran. Ketiga Astana Giribangun merupakan makam mantan Presiden Soeharto beserta keluarganya. Wisata edukasi meliputi Edupark Dirgantara Karanganyar, Agrowisata Sondokoro, Agrowisata Kampung Karet, Taman Pancasila, Situs Watu kandang, Desa Wisata Sumberbulu, dan Wisata Edukasi Lembah Dongde.

Wisata budaya meliputi Candi Cetho, Candi Sukuh, Wana Wisata Pringgodani, Museum Dayu, dan de Tjolomadoe. Wisata cagar alam yang terdapat di Kabupaten Karanganyar meliputi Taman Sakral, dan Cemoro Kandang. Wisata alam meliputi, Lawu Park, Air Tejun Grojogan Sewu, Air Terjun Jumog, Wana Wisata Sekipan, Bukit Sakura Lawu, Bukit Ganduman, Lembah Katresnan, Goa Sari River Tubing, Taman Bintang, Telaga Madirda, Taman Hutan Raya (Tahura), dan Lembah Sumilir,

B. POTREK OBJEK WISATA ALAM BUKIT SAKURA LAWU KABUPATEN KARANGANYAR

1. Profil Objek Wisata Alam Bukit Sakura Lawu

Bukit Sakura Lawu merupakan tempat wisata yang bernuansa keasrian alam dan diatas bukit terdapat pohon bunga sakura asli dari Jepang (Suryani, 2016). Selain itu Bukit Sakura Lawu termasuk ke dalam salah satu wana wisata dimana dalam pengelolaannya dilindungi secara berkala. Bukit Sakura Lawu berada di Desa Tlogodringo, Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Untuk dapat menikmati keindahan Bukit Sakura Lawu bisa berkunjung mulai pukul 08:00 sampai 17:00 WIB dengan jam operasional yang panjang pengunjung bisa menikmati keindahan alam dari pagi hingga sore hari. Pegunjung juga bisa setiap hari berwisata di Bukit Sakura Lawu karena objek wisata ini buka setiap hari nya. Bukit Sakura Lawu di dukung dengan fasilitas-fasilitas yang cukup memadai, diantaranya yaitu; terdapat Mushola, tempat parkir, toilet, playground, ATV, Hammock, gardu pandang, rumah indian, penginapan, lokasi kemah dan lain sebagainya. Spot foto menjadi tujuan wisatawan

berkunjung ke Bukit Sakura Lawu berfoto dengan menggunakan pakaian tradisional Jepang seperti kimono lebih mendapatkan nuansa Jepang dan dengan segala pernik-perniknya, selain itu camping juga menjadi hal yang menarik untuk bisa dilakukan.

Tempat wisata ini juga menyediakan beragam wahana outbond. Salah satu wahana outbond menarik yang paling digemari wisatawan adalah *flying fox*. Melalui wahana ini pengunjung bisa menikmati keindahan Bukit Sakura Lawu dari ketinggian. Pengunjung tidak perlu mengkhawatirkan keamanannya karena sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan pengamanan dan penjagaan dari petugas profesional (Suryani, 2016).

2. Potensi Objek Wisata Bukit Sakura Lawu

Bukit Sakura Lawu Kabupaten Karanganyar merupakan objek wisata yang bernuansa khas alam dengan perpaduan pemandangan pohon sakura asli dari Jepang. Potensi Bukit Sakura Lawu yang tidak dimiliki oleh tempat wisata lain yaitu Bukit Sakura Lawu atau BSL masih menjaga kelestarian alam, Bukit Sakura Lawu menolak dengan tegas pembangunan yang bersifat pengerasan di dalam tempat wisata, sehingga hal ini tidak banyak ditemukan di tempat wisata lain karena merupakan suatu daya tarik tersendiri. Bentuk pengerasan yang dimaksud yaitu, seperti pengecoran jalan, pembuatan spot foto atau wahana yang bersifat keras atau merusak alam, serta penebangan pohon untuk kepentingan pribadi wisata.

Gambar 3.1 Pohon Sakura asli di Bukit Sakura Lawu



(Dokumentasi Pribadi)

Selain terdapat berbagai wahana, dan juga spot untuk berfoto. Bukit Sakura Lawu menyediakan tempat untuk camping keluarga, maupun acara-acara tertentu, hal ini bertujuan untuk mengenalkan nuansa alam kepada wisatawan. Bukit Sakura Lawu juga menjadi tempat pembelajaran bagi masyarakat, seperti sekolah-sekolah yang memiliki kegiatan untuk mengenalkan lingkungan dan mengajarkan kepada murid-murid untuk menjaga kelestarian alam. Luas wilayah Bukit Sakura Lawu sekitar 3,2 ha dengan mayoritas di kelilingi pepohonan lereng Gunung Lawu.

Gambar 3.2 suasana camping di Objek Wisata Bukit Sakura Lawu

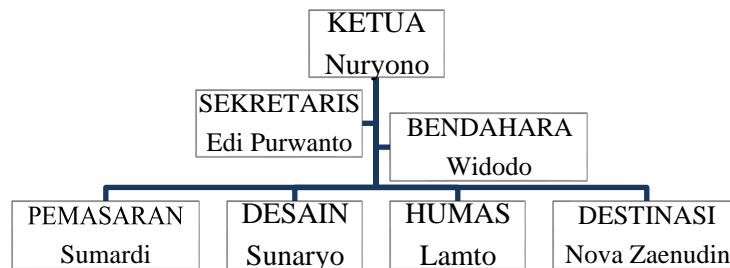


(Dokumentasi Pribadi)

3. Struktur Organisasi Pokdarwis Objek Wisata Alam Bukit Sakura Lawu

Bukit Sakura Lawu dikelola oleh kelompok sadar wisata atau Pokdarwis BSL, pengelola dari Bukit Sakura Lawu mayoritas merupakan masyarakat sekitar Objek Wisata BSL. Bagan dibawah ini merupakan struktur organisasi dari Pokdarwis BSL sebagai berikut;

III.1 Struktur organisasi Pokdarwis



Dari bagan III.1 struktur organisasi diatas dapat dilihat bahwa dalam pengelolaan Objek Wisata Bukit Sakura Lawu, *stakeholder* yang terlibat sudah memiliki peran dan tugas nya masing-masing sesuai dengan kebutuhan Objek Wisata, mulai dari kepemimpinan yaitu ketua, sekretaris, bendahara, bagian pemasaran, bagian desain, bagian humas, dan bagian destinasi wisata. Disisi lain dalam pengelolaan Bukit Sakura Lawu juga melibatkan masyarakat.

5. Kebudayaan Bukit Sakura Lawu

Tempat yang termasuk ke dalam kawasan agraris tidak bisa terpisahkan dari kebersihan, dimana Objek Wisata Bukit Sakura Lawu juga termasuk sebagai salah satu tempat agraris yang harus dijaga kebersihannya. Hal tersebut sesuai dengan tiga hakikat hubungan manusia, yang pertama yaitu hablu minallah, hablu minannas dan yang terakhir yaitu hablu minal alam. Hablu minal 'alam merupakan suatu teori dasar hubungan manusia dengan alam, dimana dalam hal ini berkaitan dengan menjaga kebersihan, tidak melakukan eksploitasi alam, tidak melakukan penebangan secara liar dan lain-lain karena fitrah manusia adalah "menjaga". Sehingga manusia

melakukan sebuah hubungan atau timbal balik dengan alam dengan baik, maka alam akan memberikan timbal balik yang baik bagi manusia (Nufus, 2022).

Pada dasarnya sebagai manusia harus bisa memberikan timbal balik yang sesuai dengan alam, hal tersebut dikarenakan alam sudah memberikan apa yang kita butuhkan, karena hidup berdampingan dengan alam sudah selayaknya menjaga dan melestarikan alam. Seperti hadits Nabi yang berbunyi;

“*atthuhurul syatrul iman*” Dari Abi Malik Al-Asy’ari,
رُطُّ نَهْطٍ رُ الْبَيْ لَمْ يَنْ

Rasulullah saw. bersabda, “**Kesucian itu sebagian dari iman**”.

Arti kesucian dalam hadits tersebut memiliki dua makna, makna yang pertama yaitu kesucian *maknawi* seperti suci dari kekufuran, kemaksiatan serta kehinaan. Makna yang kedua yaitu kesucian *hissi* yakni mencakup kebersihan, baik kebersihan badan, tempat dan pakaian. Kebersihan dapat diciptakan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah tradisis bersih desa. Tradisi bersih desa merupakan wujud rasa syukur atas apa yang telah diberikan pencipta kepada manusia dan merupakan rasa syukur atas apa yang dihasilkan dari alam semesta. Tradisi desa tidak dilakukan oleh perorangan tetapi dilakukan secara berkelompok, acara bersih desa tidak hanya sebuah kegiatan rutin yang dilakukan tiap tahunnya, akan tetapi merupakan sebuah simbolis terhadap leluhur terdahulu.

Tradisi Dhukutan merupakan salah satu tradisi yang menjunjung tinggi toleransi berhubungan baik dengan alam berupa bentuk menjaga kebersihan, tradisi Dhukutan adalah suatu tradisi yang sudah turun temurun dilakukan oleh warga lereng Gunung Lawu, tradisi ini merupakan tradisi bersih desa yang dilakukan setiap enam lapan atau tujuh bulan sekali pada Selasa Kliwon Wuku Dukut. Mitos asal usul adanya tradisi Dhukutan yang diyakini masyarakat setempat terdapat dua versi yaitu: (Asmi, S. K. 2018).

1. Versi Watugunung

Menceritakan Dewi Sinta yang tidak tahu menikah dengan anaknya sendiri yaitu Watugunung hingga dikarunia 28 (dua puluh delapan) anak. Watugunung pada waktu itu terlibat perang dengan Dewa Wisnu, Dewa Wisnu berhasil membunuh Watugunung pada hari Selasa Kliwon wuku Dukut, atas kejadian tersebut Dewi Sinta meminta agar ikut serta dibunuh oleh Dewa Wisnu agar bisa hidup bahagia di surga bersama anak-anaknya. Dalam versi ini dipercayai bahwa salah satu anak Watugunung dikubur di Desa Nglurah, sehingga warga setempat memperingatinya dengan Dhukutan.

2. Versi Arlangga

Versi Arlangga menceritakan terdapat dua tokoh yaitu Kyai Menggung seorang pengikut Airlangga dan musuhNya Nyai Rasa Putih. Pada akhir cerita kedua tokoh yang bermusuhan ini akhirnya menikah pada hari Selasa Kliwon Wuku Dhukut. Maka dari itu masyarakat setempat memperingatinya dengan tradisi Dhukutan.

Prosesi Tradisi Dhukutan dimulai dengan musyawarah bersama terkait berapa anggaran yang diperlukan, dan berapa penarikan dana, kemudian melakukan kerja bakti di tempat ritual yaitu situs Menggung serta membawa sesaji yang berbahan dasar dari jagung, terdapat dua tokoh desa yang membuat sesaji berbeda dengan warga lain. Pada hari Senin Wage seluruh sesaji desa disimpan dalam tinon. Upacara Dhukutan dilakukan pada hari Selasa Kliwon tepat pada pukul 07.00 WIB, sesaji dibawa masuk ke punden oleh beberapa laki-laki. Setelah rombongan masuk dilakukan beberapa acara seperti pembakaran dupa, pengikatan patung dengan tinon iket, sesepuh desa membacakan doa, pembagian mata air, masuk ke situs Kalijaro Watuwalang dan ditutup dengan hiburan wayang (Asmi, 2018)

BAB IV

IDENTIFIKASI DAN PERAN *STAKEHOLDER* DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA BUKIT SAKURA LAWU

Dalam proses *Collaborative Governance* tidak terlepas dari peran *stakeholder* di dalamnya. Pada Bab ini akan membahas terkait indentifikasi dari masing-masing *stakeholder* yang terlibat serta bagaimana peran dari *stakeholder* tersebut dalam berkolaborasi untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan di Objek Wisata Bukit Sakura Lawu Kabupaten Karanganyar.

A. Identifikasi *Stakeholder*

1. Perum Perhutani Semarang (Divisi Regional Jawa Tengah)

Perhutani merupakan sebuah perusahaan umum yang bergerak di bidang kehutanan, dengan memiliki cakupan wilayah yang cukup luas. Perhutani berdiri sejak tahun 1897 yang merupakan perusahaan yang dibentuk dari jaman belanda dengan tujuan pengelolaan hutan Jawa dan Madura "*Brosreglement*" dan "*Reglement*", pada tahun-tahun berikutnya perusahaan perhutani mengalami perkembangan. Hingga pada tahun 1945 Pasca kemerdekaan Republik Indonesia Dienst van het Boshwezen yang pada saat itu merupakan pimpinan dari perhutani, melimpahkan kelembagaan kepada jawatan Kehutanan Republik Indonesia.

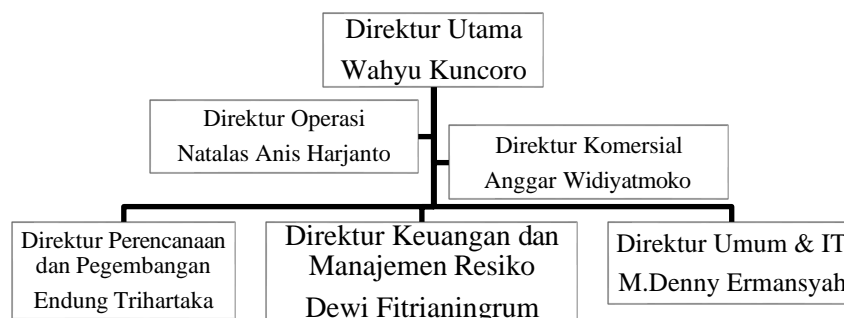
Kewajiban dan tujuan perusahaan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Kewajiban dan tujuan tersebut menjadi landasan tugas dan fungsi perseroan. Tujuan perusahaan adalah menjalankan usaha yang bermanfaat bagi masyarakat dengan menyediakan barang atau jasa yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan hasil hutan yang bermutu tinggi, akan tetapi tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

Salah satu bagian kerja Perum Perhutani yaitu Divisi Regional Jawa Tengah mengelola hutan seluas 635.858 Ha atau 19,5% dari luas Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,2 juta Ha. Wilayah kerja Divisi Regional Jawa Tengah dibagi

menjadi 20 (dua puluh) Kesatuan Pemangku Hutan dengan 148 Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) dan 589 Resor Pemangku Hutan (RPH), 4 Bagian Tata Hutan Wilayah (PHW), 2 Usaha Mandiri Unit (KBM), 4 Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT), 1 Pabrik Turunan Terpentin Gondorukem (PDGT), 1 Pabrik Minyak Kayu Putih (PMKP), dan 1 Industri Perkayuan (IK PMU). Divisi Regional Jawa Tengah mengelola produksi kayu (seperti jati, pinus, damar, mahoni, dan sonokeling), non kayu (seperti getah pinus, daun kayu putih, damar/kopal), dan agroforestri seperti jagung (Perum Perhutani, 2022).

Pada bagan IV.1 akan menggambarkan struktur organisasi dari Perum Perhutani Semarang.

IV.1 Struktur Organisasi Perum Perhutani Divre Jateng



Struktur organisasi diatas menjelaskan bahwa dalam pengelolaan kehutanan, dari masing-masing stakeholder memiliki kewajiban dan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan perannya. Direktur Utama memiliki tugas dalam memimpin jalannya sebuah organisasi, dan program yang terkait dengan wilayah kerja perhutani khususnya pada Perhutani Divre Jawa Tengah. Kemudian, terdapat Direktur Operasi yang bertanggung jawab terhadap proses operasional, produksi, proyek hingga kualitas produksi, pengembangan kualitas produk, dalam hal ini perhutani memiliki beberapa produk yang dipasar kan yaitu; kayu (jati,dan kayu rimba lain), Gondorukem (minyak atsiri, minyak kayu putih dan lain-lain), Biomassa (produk *wood pellet*, *wood chip*), serta tugas dari direktur operasi yaitu menyusun strategi dalam pemenuhan target dan cara mencapai target tersebut.

Divisi selanjutnya yaitu, Direktur Komersial, yang bertanggung jawab terhadap seluruh divisi dalam perusahaan. Direktur Perencanaan dan Pengembangan memiliki tugas dalam merumuskan program, dan mengkoordinasikan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko bertugas untuk memenuhi kewajiban pelaporan, membuat anggaran dasar tahunan dan anggaran dasar lainnya, serta bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengelola resiko yang terjadi atau yang akan terjadi. Divisi terakhir yaitu Direktur Umum dan IT, yang memiliki tugas dalam mengontrol, serta mengelola seluruh aset dalam perusahaan, serta bertanggung jawab dalam bidang teknologi informasi perusahaan. (Laman Perhutani Semarang, 2022)

2. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH Dono Lestari)

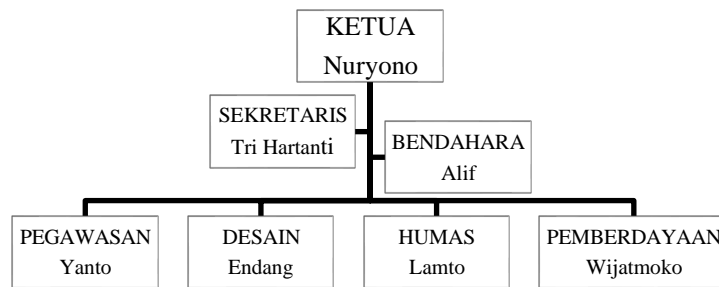
Pengorganisasian masyarakat melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), dengan tujuan meningkatkan taraf hidup. Pengorganisasian masyarakat merupakan salah satu alat yang perlu digunakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, pengorganisasian mengacu pada jenis reaksi masyarakat yang tidak partisipatif terhadap proses pembangunan. Oleh karena itu, kepentingan masyarakat tidak terwakili dalam proses pembangunan ini, pengorganisasian dianggap penting untuk membangkitkan ambisi masyarakat dan memperkuat posisi negosiasi masyarakat dalam proses pembangunan. Selain sebagai wadah untuk mendongkrak harapan, menjadi wahana implementasi inisiatif-inisiatif pemberdayaan yang dijalankan baik oleh sektor publik maupun swasta. Lembaga Masyarakat Desa Hutan mendapat pendampingan dari Perum Perhutani dalam melakukan kegiatan pemberdayaan kehutanan. (Choiria, Hanafi, & Mochamad, 2017)

Lembaga Masyarakat Desa Hutan Dono Lestari merupakan lembaga yang bertugas untuk kebersamai melakukan pengawasan, dan pemberdayaan di Objek Wisata Bukit Sakura Lawu. Hal tersebut seperti hasil wawancara penulis dengan Bapak Nuryono selaku ketua LMDH Dono Lestari.

”kalo Bukit Sakura Lawu itu di bawah pengawasan LMDH Dono Lestari, kebetulan saya sendiri ketua nya. Untuk tugasnya mengawasi dan menjembatani antara Pokdarwis BSL dengan pihak Perum Perhutani atau dengan Pihak Investor Palawi”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa LMDH Dono Lestari memiliki kedudukan yang penting di dalam kolaborasi pengelolaan Objek Wisata Bukit Sakura Lawu Kabupaten Karanganyar. Struktur organisasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan Dono Lestari dapat dilihat pada bagan IV.2 dibawah ini;

IV.2 Struktur Organisasi LMDH Dono Lestari



Pada bagan struktur diatas merupakan *stakeholder* yang tergabung dalam LMDH Dono Lestari dengan tugas dan perannya masing-masing. Pertama yaitu ketua memiliki tanggung jawab dalam memimpin LMDH Dono Lestari, dan mengkoordinir seluruh kegiatan, sekretaris memiliki tugas perihal ke-administrasian atau surat menyurat. Ketiga, yaitu bendahara bertanggung jawab atas keuangan baik dari dana organisasi maupun dana dari pihak perhutani kepada LMDH sebagai operasional. Divisi keempat yaitu pengawasan bertugas mengawasi pengelolaan objek wisata yang berada di Kecamatan Tawangmangu, atau yang termasuk kedalam wana wisata. Divisi kelima yaitu, bagian desain bertugas untuk membuat desain objek wisata yang sesuai dengan peraturan Perum Perhutani untuk objek wisata wana wisata. Divisi yang keenam yaitu humas, memiliki tanggung jawab dalam menjalin kerjasama baik internal maupun eksternal. Divisi yang terakhir yaitu pemberdayaan, memiliki tanggung jawab dalam memberikan pengarahan, wawasan kepada pihak pengelola tempat wisata.

3. Masyarakat Peduli Api (MPA Singo Lawu)

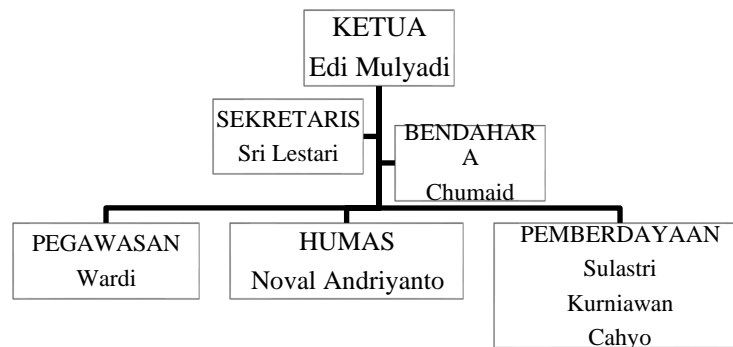
Kepedulian terhadap kelestarian hutan merupakan tanggung jawab dari berbagai pihak, mulai dari pemerintahan, non-pemerintahan dan masyarakat. Akan tetapi, tidak semua menyadari akan pentingnya menjaga kelestarian hutan tersebut, mayoritas hanya memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan semata, tidak memikirkan bagaimana jangka panjang kedepannya. Dengan demikian Balai Pengendalian Hutan dan Lahan Daerah Sulawesi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memebtnuk organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk meningkatkan keterlibatan dan kemandirian masyarakat dalam upaya mendukung pengendalian karhutla. Peraturan Dirjen PPI No. 3 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pengembangan maupun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menetapkan MPA sebagai prioritas utama di daerah rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) (Fadlillah , Basuni, & Sunarminto, 2017).

Keterlibatan MPA dalam pengendalian kebakaran hutan memiliki peran yang sangat penting, sehingga setiap anggota MPA diberi pelatihan dasar-dasar pengendalian, pemberantasan, dan pencegahan karhutla. Selain itu, MPA mendapatkan instruksi tentang pembukaan lahan tanpa pembakaran, serta memberikan wawasan kepada masyarakat setempat tentang kebakaran hutan, resiko dan pencegahannya. MPA berspekulasi bahwa kemarau panjang seagai faktor utama terjadinya kebakaran hutan, sehingga pelatihan tersebut menjadi suatu kegiatan yang sangat penting bagi masyarakat sekitar (Fadlillah , Basuni, & Sunarminto, 2017).

Masyarakat Peduli Api Singo Lawu merupakan sebutan bagi organisasi peduli kerawanan yang berada di Kecamatan Tawangmangu, MPA Singo Lawu sekaligus menangani dan mengawasi Objek Wisata Bukit Sakura Lawu dari kebakaran hutan. Hal tersebut dilakukan karena Objek Wisata Bukit Sakura Lawu yang mayoritas kawasannya terdiri dari hutan dan termasuk ke dalam wana wisata yang notaben nya harus dijaga dan dipelihara.

Stakeholder yang terlibat dalam MPA Singo Lawu memiliki peran dan tugasnya masing-masing, hal tersebut dapat dilihat pada bagan IV.3, dibawah ini;

IV.3 Struktur Organisasi MPA Singo Lawu



Struktur organisasi dari MPA Singo Lawu dapat menjelaskan bahwa dalam upaya menjaga kelestarian hutan, perlu adanya sebuah struktural yang jelas dan rinci sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pertama yaitu ketua, memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinir seluruh program dari MPA Singo Lawu, baik kegiatan *eksternal* organisasi maupun *internal*. Kedua yaitu sekretaris memiliki tugas dalam bidang ke-administrasian. Ketiga yaitu bendahara mengelola segala keuangan masuk maupun keluar. Keempat terdapat divisi pengawasan, yang memiliki tugas mengawasi dan menjaga hutan dan Objek Wisata yang termasuk kedalam wana wisata dari berbagai kerusakan hutan, baik kebakaran, tanah longsor, penebangan secara liar, dan segala bentuk kerusakan lainnya. Divisi kelima yaitu bagian humas yang memiliki tugas menjalin hubungan dengan organisasi pecinta alam lainnya untuk melakukan kolaborasi dalam melestarikan hutan. Divisi yang terakhir yaitu pemberdayaan, dimana memiliki tanggungjawab dalam memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat mengenal alam lebih dalam, seperti melakukan kegiatan tanam pohon, simulasi tanggap bencana kebakaran dan lain-lain.

Keberadaan MPA Singo Lawu memberikan dampak yang sangat baik terhadap keberlangsungan dan kamanan kawasan hutan, Objek Wisata Bukit

Sakura Lawu merupakan salah satu tempat wisata yang masih menjaga kelestarian hutan dan melakukan reboisasi setiap bulannya. Hal tersebut seperti yang telah dipaparkan Bapak Edi selaku ketua MPA Singo Lawu.

“adanya MPA Singo Lawu ini sangat berguna pada keamanan kehutanan, dulu sempat ada tanah longsor di kawasan wisata cemoro kandang diakibatkan kurangnya pepohonan karena dilakukan pembangunan dalam bentuk pengerasan yang cukup banyak, akan tetapi jika Bukit Sakura Lawu sendiri belum pernah terjadi kerusakan hutan hingga saat ini”

Upaya MPA Singo Lawu dalam mencegah kerusakan hutan baik dari tanah longsor, kebakaran hutan, maupun penggundulan hutan di seluruh kawasan lereng hutan Gunung Lawu, termasuk di Objek Wisata Bukit Sakura Lawu yaitu dengan mengadakan penanaman pohon di setiap kawasan hutan yang dilindungi. Hal ini dilakukan MPA Singo Lawu dengan menggandeng beberapa organisasi pecinta alam lainnya seperti LMDH, serta Kelompok Sadar Wisata.

Gambar 4.1 Penanaman Pohon BKPH Lawu Utara



(Dokumentasi MPA Singo Lawu)

4. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS BSL)

Kelompok sadar wisata atau POKDARWIS merupakan kelompok yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa dan kemauan masyarakat sendiri untuk melestarikan daya tarik wisata serta memajukan pariwisata di suatu desa tertentu, sehingga keanggotaan POKDARWIS sangat mendukung pembangunan di bidang kepariwisataan. Dengan demikian, POKDARWIS terdiri dari masyarakat yang

mata pencahariaannya terkait dengan penyediaan barang dan/atau jasa untuk kebutuhan wisatawan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan masyarakat yang bermukim di sekitar atraksi/atraksi wisata (Suyono, 2019).

Kelompok Sadar Wisata BSL (Bukit Sakura Lawu) merupakan organisasi yang mengelola Objek Wisata tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan POKDARWIS BSL Memfasilitasi wisatawan yang berkunjung, serta merawat dan menjaga Bukit Sakura Lawu dalam jangka yang panjang. Kelompok Sadar Wisata BSL mayoritas merupakan masyarakat sekitar dari Objek Wisata yaitu Desa Tlogo Dringo. Dengan demikian dalam pengelolaan tempat wisata lebih mudah, karena anggota nya terdiri dari penduduk asli. Hal tersebut seperti hasil wawancara penulis dengan Bapak Nuryono selaku Ketua Pokdarwis BSL.

“Anggota yang tergabung dalam Pokdarwis BSL merupakan anggota sukarela penduduk asli Tlogo Dringo khususnya, dan rata-rata juga tergabung dalam organisasi pecinta alam. Karena Bukit Sakura Lawu masih berada di sekitar permukiman masyarakat”

Dari pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa anggota Pokdarwis BSL melakukan tugasnya dalam mengelola Objek Wisata dalam bentuk sukarela sebagai bentuk kekeluargaan.

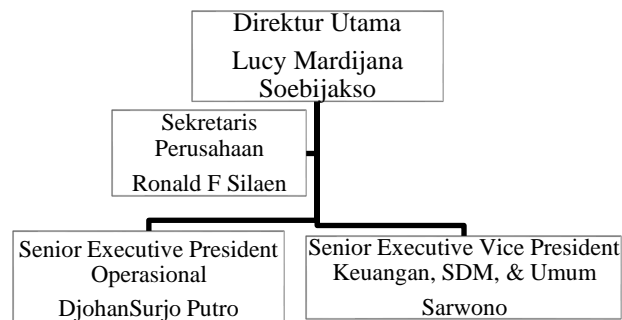
5. Palawi Risorsis

PT Palawi Risorsis (selanjutnya disebut sebagai Palawi Risorsis) merupakan anak perusahaan Perum Perhutani yang awalnya didirikan pada tahun 2002 dengan nama PT Perhutani Alam Wisata PT Palawi Risorsis merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, (dikutip dari laman Palawi Risorsis), Paket wisata yang ditawarkan oleh Palawi Risorsis antara lain mencakup wisata alam, wisata pendidikan, dan wisata petualangan yang terbagi di dua lokasi, yakni Coban Rondo dan Baturraden. Aktivitas-aktivitas pendukung seperti outbound dan wisata organik juga merupakan bagian dari layanan kami untuk memberikan pengalaman berwisata yang tidak terlupakan. Melalui berbagai layanan yang kami tawarkan, Palawi Risorsis berhasil meraih juara harapan Abhiwara Wisata dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk kategori pengelola

swasta. Selain mengelola objek wisata alam, untuk dapat menghadirkan layanan pariwisata yang menyeluruh maka kami juga memiliki layanan jasa penyediaan tiket serta menyelenggarakan berbagai bentuk paket perjalanan wisata melalui biro perjalanan yang kami miliki. Didukung dengan lebih dari 70 karyawan, Palawi Risorsis memiliki visi dan misi. Visi untuk membangun bisnis Palawi sebagai pemimpin dalam industri wisata, jasa lingkungan, dan penggunaan sumber daya alam. Memiliki misi dengan menawarkan layanan yang unggul, memastikan kepuasan pelanggan dan memanfaatkan sumber daya alam serta lingkungan secara lestari.

Palawi Risorsis memiliki struktur organisasi yang struktural sesuai dengan tugas dan peranya msing-masing, hal tersebut seperti yang tertera dalam bagan IV.4 dibawah ini;

IV.4 Struktur Organisasi Palawi Risorsis



Dari data bagan struktur organisasi diatas dapat disimpulkan bahwa Palawi Risorsis telah memiliki sebuah struktural yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, diantaranya yaitu. Pertama Direktur Utama memiliki kewajiban dalam memimpin dan bertanggungjawab terhadap jalannya sebuah organisasi. Kedua sekretaris perusahaan memiliki peran yang sangat penting karena memiliki tanggung jawab dalam bidang administrasi. Ketiga terdapat *Senior Excecutive President Operasional* bertanggung jawab dalam pengoperasian seluruh program perusahaan. Divisi terakhir yaitu *Senior Executive Vice President* Keuangan, SDM, dan Umum memiliki tanggung jawab dalam mengawasi dan mengelola berbagai departemen di perusahaan dan tanggung jawab tersebut bervariasi tergantung pada

kebutuhan perusahaan. Selain empat divisi tersebut Palawi Risorsis dalam melakukan suatu kegiatan, juga terdapat beberapa staf lainnya.

B. Peran Stakeholder

Stakeholder dimaknai sebagai individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan, keterlibatan, atau dipengaruhi oleh kegiatan atau program pembangunan. Pada pengelolaan pariwisata pemangku kepentingan dibagi menjadi *stakeholder primer* atau utama, yaitu sebagai seseorang atau entitas yang sangat signifikan untuk mendukung keberlangsungan kehidupan, proses organisasi, organisasi, dan *stakeholder sekunder* sebagai orang atau kelompok yang berada di masa tertentu tetapi tidak penting bagi keberlangsungan organisasi atau dimasa depan organisasi dapat berdampak atau dipengaruhi oleh hal tersebut (Handayani & Warsono, 2017).

Pada pengelolaan Bukit Sakura Lawu seluruh pelayanan yang menyangkut wisatawan disediakan oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari pengelola dan pelaku wisata. Keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan wisata membentuk forum musyawarah berupa kelompok sadar wisata. Tujuan dibentuknya forum ini adalah sebagai sarana dan media tukar informasi, komunikasi, dan kerjasama antara pengelola wisata dalam mengembangkan wisata itu sendiri. Dengan demikian memiliki tugas menampung dan menyampaikan aspirasi serta permasalahan yang terjadi pada pihak perhutani selaku yang bertanggung jawab terhadap wilayah kehutanan serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti amati bahwasanya dalam pengelolaan dan pengembangan Objek Wisata Bukit Sakura Lawu Kabupaten Karanganyar melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan melibatkan Perusahaan Umum Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH Dono Lestari), Masyarakat Peduli Api (MPA Singo Lawu), Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS BSL), masyarakat sekitar, serta Palawi Risorsis sebagai investor yang ikut berpartisipasi. Pada pembahasan ini akan dijelaskan bagaimana peran -

peran dari *stakeholder* yang berkolaborasi dalam pengelolaan objek wisata Bukit Sakura Lawu Kabupaten Karanganyar dan bagaimana proses kolaborasi antar *stakeholder*.

a. Peran *Stakeholder* Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Bukit Sakura Lawu

Dalam teori *Collaborative Governance* Ansel dan Gash terdapat enam elemen penting, pada peran *stakeholder* ini menggunakan elemen yang kedua yaitu aktor negara dan non-negara ikut berpartisipasi, dimana aktor negara yaitu pihak KPH Perhutani, sedangkan aktor non-negara yaitu pihak swasta adalah investor atau Palawi Risorsis, pihak masyarakat yaitu LMDH Dono Lestari, MPA Singo Lawu dan POKDARWIS BSL.

Pembuatan kebijakan merupakan tanggungjawab pemerintah dalam perkembangan pariwisata secara sistematis, contohnya menyiapkan sumber dana, meningkatkan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia di dalamnya. Pihak swasta bertindak sebagai pelaku bisnis atau investor dari objek wisata tersebut karena sebuah tempat wisata membutuhkan sarana pendukung, seperti toilet, wahana permainan, promosi media sosial dan sarana yang lain. Sedangkan sektor masyarakat sebagai pemilik atau pengelola yang bertindak dalam keberlangsungan tempat wisata, pengelolaan, perawatan dan lain-lain. Objek Wisata Bukit Sakura Lawu dalam sektor pemerintah berkolaborasi dengan Perum Perhutani.

Perhutani merupakan sektor yang bergerak di pemerintahan bertugas membuat kebijakan dalam pengelolaan objek wisata yang mayoritas termasuk ke dalam kawasan hutan. Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN) yang berbentuk perusahaan umum. Perhutani mewujudkan *efektifitas* dan *efisiensi* kinerja dan organisasi dengan memiliki beberapa anak perusahaan yang bertanggung jawab sesuai dengan sektor kehutanan. Demikian dengan Objek Wisata Bukit Sakura Lawu berpusat kepada PT Perhutani Semarang Divre Jateng, secara ke administrasian Bukit Sakura Lawu terdaftar sebagai wana wisata. Perhutani memiliki visi menjadikan perusahaan pengelola hutan

berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat, dan memiliki misi mengelola sumberdaya hutan secara lestari, peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan, mengoptimalkan bisnis kehutanan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (Wulandari, 2020).

Status kepemilikan Objek wisata Bukit Sakura Lawu masih resmi milik KPH Perhutani, sehingga hubungan dengan pihak pengelola atau Pokdarwis BSL merupakan sebuah hubungan mitra usaha. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Eko selaku bagian kepala staf umum Perhutani Semarang.

“Jika sertifikat kepemilikan Objek Wisata Bukit Sakura Lawu memang masih milik perhutani, karena pemberian kawasan objek wisata hanya sebagai bentuk penghargaan kepada MPA Singo Lawu yang mayoritas anggotanya saat ini juga tergabung menjadi Pokdarwis BSL sendiri, sehingga dalam penanggungjawab masih dari pihak Perhutani”

Dalam melakukan riset terhadap status kepemilikan tanah Bukit Sakura Lawu atau sertifikat tanah, penulis tidak diperbolehkan mendapatkan bukti fisik baik foto maupun soft copy dari sumber secara langsung karena merupakan dokumen rahasia atau dokumen penting perusahaan, sehingga penulis hanya berlandaskan wawancara dengan Bapak Eko selaku staff umum Perhutani Semarang.

Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan kehutanan, dengan menjalin kemitraan dengan perhutani. LMDH memiliki hak kelola di petak hutan pangkuan di wilayah desa dimana LMDH bekerjasama dengan perum perhutani dan mendapat bagi hasil dari kegiatan kerjasama tersebut. Masyarakat yang tergabung sebagai anggota LMDH merupakan masyarakat desa hutan yang peduli terhadap kelangsungan sumber daya hutan, memiliki struktur organisasi, memiliki regulasi dan mekanisme kerja yang tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), memiliki rencana kerja, memiliki rencana pengelolaan, dan rencana pemanfaatan hasil hutan secara partisipatif. Berdasarkan pernyataan tersebut dikuatkan dengan

hasil wawancara peneliti terhadap ketua LMDH Dono Lestari Bukit Sakura Lawu Kabupaten Karanganyar.

“LMDH merupakan lembaga yang dimitrakan dari perhutani untuk menjaga kerawanan hutan dari ancaman yang merugikan hutan, seperti pembangunan wisata yang bersifat pengerasan, penebangan pohon untuk kepentingan tempat wisata dan lain-lain. Peran LMDH di Bukit Sakura Lawu adalah sebagai pengawas kegiatan maupun pembangunan, karena merupakan pihak kedua dari perhutani, pernyataan Bapak Nuryono selaku ketua LMDH Dono Lestari”

Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH yang sudah melengkapi persyaratan kemudian dapat mengajukan formulir untuk mendapatkan dana sharing, dana ini nantinya digunakan untuk keberlangsungan organisasi sebagai bentuk dukungan dari perum perhutani, hal tersebut dengan harapan LMDH dapat menjalankan tugas nya dengan baik. Peran LMDH sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan pengelolaan objek wisata; diantaranya yaitu:

- a.) Memfasilitasi perancangan, pelaksanaa program, pemantauan, dan evaluasi setiap kegiatan bagi pengelola lahan (pesanggem) dan pihak yang berkepentingan. Hal ini berhasil dicapai jika para pemilik lahan milik Perum Perhutani tergabung dalam sebuah organisasi.
- b.) Menyelaraskan operasi pengelolaan sumber daya hutan dengan kondisi kehidupan dan sifat sosial petani untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup.
- c.) Meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab pada pengelolaan, kelestarian dan manfaat sumber daya hutan.
- d.) Meningkatkan pendapatan negara, desa dan pihak yang berkepentingan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, peran dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan memberikan dampak yang besar bagi berjalannya pengelolaan Objek Wisata yang termasuk kedalam wana wisata, hal ini dapat dilihat dari tugas dan wewenang LMDH yang menyeluruh, mulai dari tingkat masyarakat hingga pemerintahan. Stakeholder yang berkolaborasi dalam pengelolaan Bukit Sakura Lawu selain LMDH Dono Lestari yaitu MPA Singo Lawu.

MPA atau Masyarakat Peduli Api merupakan sebuah organisasi secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih/diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Edi selaku ketua dari MPA Singo Lawu.

”MPA Singo Lawu itu organisasi relawan peduli dengan kelestarian alam terutama kebakaran, MPA Singo Lawu itu terdiri dari 3 kecamatan, Ngargoyoso, Jenawi, Tawangmangu. Kalo MPA Singo Lawu disini tiap bulannya ada pertemuan rutin membahas perkembangan dari setiap kecamatan, dan merencanakan kegiatan setiap bulannya. Contohnya kemarin sempat ada program jika musim hujan tiba MPA Singo Lawu ada kegiatan penanaman pohon, kegiatan bersih-bersih kawasan kehutanan. Jika musim kemarau MPA bertugas patroli di setiap kawasan lereng Gunung Lawu”

Pembentukan MPA Singo Lawu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Peraturan Direktorat Jenderal PPI No.3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan pembinaan MPA, serta berdasarkan pasal 36, pasal 37 dan pasal 38 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, diatur pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api.

Peran MPA Singo Lawu dalam pengelola objek wisata Bukit Sakura Lawu adalah sebagai pengawas dari kerusakan hutan yang diakibatkan oleh objek wisata, dimana hal tersebut harus tetap memperhatikan kelestarian alam. Objek wisata Bukit Sakura Lawu terdapat kesekretariatan dari MPA Singo Lawu sendiri untuk pemantauan dari segala kegiatan. Sehingga tugas MPA Singo Lawu dapat lebih mudah dilakukan yang berkaitan dengan penjagaan kelestarian hutan BSL, khususnya dari bencana kebakaran.

MPA Singo Lawu pernah menjuarai beberapa perlombaan baik dari tingkat provinsi maupun nasional, hal tersebut dibuktikan dengan pemberian sertifikat

penghargaan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kejuaraan yang pernah di dapat oleh MPA Singo Lawu diantaranya yaitu yaitu:

“pernah menjuarai tingkat provinsi sebagai organisasi pecinta alam, mendapatkan penghargaan tingkat nasional dalam bentuk apresiasi terhadap kinerja MPA Singo Lawu, mengapa demikian karena biasanya setiap 3 tahun sekali Gunung Lawu dan sekitarnya mengalami kebakaran, setelah adanya MPA Singo Lawu hal itu tidak pernah terjadi lagi bahkan populasi pohon semakin bertambah”. Pernyataan tersebut di paparkan oleh Bapak Edi selaku ketua MPA Singo Lawu.

Gambar 4.2 Apel Siaga Bersama Gubernur Jawa Tengah



(Sumber : Dokumentasi MPA Singo Lawu)

Stakeholder selanjutnya yang ikut berkolaborasi dalam melakukan pengelolaan Objek Wisata Bukit Sakura Lawu merupakan dari pihak swasta yaitu Palawi Resorsis. Peran Palawi Resorsis dalam berpartisipasi yaitu sebagai pihak investor, dimana investor merupakan kegiatan menanamkan modal dengan harapan akan mendapatkan imbalan berupa keuntungan. Pihak Palawi Risorsis memberikan modal berupa bentuk dana, maupun materi kepada pihak pengelola atau Pokdarwis BSL untuk keberlangsungan tempat wisata.

Peran *stakeholder* yang terakhir yaitu dari Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS BSL). Pokdarwis BSL bertugas mengelola objek wisata Bukit Sakura Lawu baik dalam hal administratif maupun kegiatan tempat wisata. Tugas dari Pokdarwis BSL meliputi, pengelolaan tempat wisata, melakukan perawatan fasilitas rutin setiap harinya, memfasilitasi wisatawan yang berkunjung, menjalin kerjasama dengan pihak luar, menjaga kelestarian hutan yang terdapat di Bukit

Sakura Lawu, dan lain-lain. Pernyataan tersebut seperti yang dipaparkan oleh Ibu Fufung selaku pedagang di Bukit Sakura Lawu yang mengikuti perkembangan Bukit Sakura Lawu dari awal berdirinya, saat diwawancarai oleh penulis di warung makan nya.

“Dalam berjalannya waktu pengelolaan dari Pokdarwis sangat membantu baik bagi wisatawan maupun pedagang sekitar, seperti dalam urusan perizinan/pemberian fasilitas, perairan, pelistrikan sudah dari tempat wisata, jadi menurut saya kinerja stakeholder BSL sudah baik.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran dari Pokdarwis sangat penting bagi keberlangsungan Objek Wisata, serta dalam berjalannya pengelolaan Pokdarwis BSL sangat maksimal dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat berdampak pada pedagang dan masyarakat sekitar.

b. Proses kolaborasi dalam pengelolaan Objek Wisata Alam Bukit Sakura Lawu

Proses kolaborasi dimulai dengan awal pertemuan dari setiap *stakeholder* dimana memberikan suatu kepercayaan dalam menyatukan program yang telah ditetapkan secara bersama. Proses pertemuan dari beberapa organisasitersebut sama seperti elemen penting ke empat yang di kemukakan oleh Ansel dan Gash yaitu forum dibentuk secara formal dengan kesepakatan bersama. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ketua kelompok sadar wisata sebagai berikut:

“awal mula pendirian Bukit Sakura Lawu adalah sebagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh pihak perhutani kepada MPA Singo Lawu, lalu kemudian dijadikan tempat wisata dengan menggandeng beberapa stakeholder serta masyarakat sekitar”

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Objek Wisata Bukit Sakura Lawu sudah memiliki perjanjian yang sah antara Pokdarwis BSL dengan pihak Perum Perhutani. Hal tersebut diperkuat dengan bukti penghargaan. Seiring berjalannya waktu Bukit Sakura Lawu semakin ramai pengunjung hal tersebut dibuktikan dengan penjualan tiket yang mencapai 1000 tiket per bulannya. Seperti yang di ungkapkan oleh ketua MPA Singo Lawu Bapak Edi Mulyadi, bahwa

memang dulu waktu pembukaan Bukit Sakura Lawu pengunjung yang datang mencapai 4000 orang, dan setiap bulan nya bisa 100-1000 pengunjung.

Karena kurangnya koordinasi di dalam pengelolaan Bukit Sakura Lawu menyebabkan objek wisata tidak berjalan dengan baik, sehingga diputuskan dibentuknya sebuah kelompok yang khusus untuk menangani dalam pengelolaan Bukit Sakura Lawu, seperti hasil wawancara dengan ketua Pokdarwis yaitu Bapak Nuryono.

“kelompok sadar wisata itu dibentuk karena dilihat semakin banyaknya pengunjung yang datang untuk menikmati keindahan objek wisata namun belum ada yang mengelola sepenuhnya dengan baik, sehingga muncullah ide untuk membentuk suatu organisasi yang disebut dengan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) sehingga setiap ada bantuan yang berikan dapat dikelola dengan baik, dan dari dulu sekarang di ketuai oleh saya sendiri”

Pembentukan Objek Wisata Bukit Sakura Lawu dengan mengikuti ketetapan dari pihak KPH Perhutani sebagai bentuk penghargaan kepada MPA Singo Lawu, hal tersebut sesuai dengan elemen penting Ansel dan Gash yang pertama yaitu forum dibentuk oleh badan publik yaitu pihak KPH Perhutani. Setelah terbentuk dengan sah Kelompok Sadar Wisata atau POKDARWIS kemudian mulai mengandeng beberapa *stakeholder* yang dibutuhkan dalam pengelolaan Bukit Sakura Lawu, diantaranya yaitu LMDH, dan MPA Singo Lawu. Dalam perekrutan sebagai partner pengelolaan tentu memperhatikan faktor-faktor tertentu diantaranya yaitu; dapat membantu dalam pengelolaan objek wisata Bukit Sakura Lawu, tidak mengharapkan keuntungan lebih secara materil karena memang bertujuan untuk melestarikan alam serta dapat berkomitmen dalam menjaga Bukit Sakura Lawu sebagai salah satu wana wisata.

Setelah melalui proses awal pembentukan sebuah organisasi dengan berkolaborasi dari beberapa *stakeholder*, dalam proses pengelolaan Objek Wisata Alam Bukit Sakura Lawu dilakukan oleh Pokdarwis BSL hal ini disepakati melalui rapat koordinasi dengan LMDH Dono Lestari dan MPA Singo Lawu, seperti hasil wawancara dengan Bapak Nuryono selaku ketua Pokdarwis BSL.

“jadi, dari rapat awal pembentukan disepakati Bersama bahwa pengelolaan Bukit Sakura Lawu di pegang Pokdarwis, karena terdiri dari masyarakat sekitar wisata dan sukarela”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Bukit Sakura Lawu secara langsung di lakukan oleh Pokdarwis Bukit Sakura Lawu dengan LMDH Dono Lestari sebagai tangan kedua dari Perhutani, MPA Singo Lawu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan Palawi Risorsis sebagai investor tetap Bukit Sakura Lawu.

Beberapa *stakeholder* yang terlibat dan bentuk kolaborasi dalam pengelolaan Bukit Sakura Lawu tertera pada tabel 4.1 dibawah ini;

Tabel 4.1 *stakeholder* dan perannya dalam pengelolaan Objek Wisata Bukit Sakura Lawu

No	Pihak –pihak yang terkait	Bentuk kolaborasi	Keterangan
1	KPH Perhutani	Melakukan musyawarah dan pembinaan kepada pengelola serta masyarakat yang menjadi penggerak dalam pengelolaan tempat wisata.	Untuk mengetahui kendala yang terdapat di Bukit Sakura Lawu serta untuk kelanjutan pengelolaan objek wisata
2	Investor Palawi	Memberikan	Berhenti sejak

		bantuan berupa investasi dana maupun barang	3 tahun terakhir
		Melakukan promosi objek wisata Bukit Sakura Lawu	Promosi pada media sosial atau di lingkup pemerintahan
3	LMDH Dono Lestari	Menjaga objek wisata dari pembangunan yang berbentuk pengerasan	Melarang segala pembangunan Objek wisata yang berbentuk pengerasan
		Mengunjungi objek wisata yang terdaftar sebagai wana wisata	Memberikan panduan kepada pengelola wisata terkait wana wisata
4	MPA Singo Lawu	Mengawasi objek wisata dari bentuk kekerasan alam seperti kebakaran, tanah longsor dll	Melakukan penanaman pohon, melestarikan tempat wisata
5	Kelompok Sadar Wisata POKDARWSI BSL	Mengelola objek wisata Bukit Sakura Lawu	Pengelola objek wisata

6	Masyarakat / pedagang	Melayani kebutuhan wisatawan serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam berwisata	Pembawa wisatawan
7	Pengunjung/wisatawan	Pemasukan secara finansial Rp.10.000 per orang dan untuk camping Rp.75.000 per tenda	Untuk pengelolaan dan pengembangan tempat wisata

Sumber : Data diolah oleh peneliti hasil wawancara para informan

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa masing-masing *stakeholder* dalam pengelolaan Objek Wisata Bukit Sakura Lawu memiliki peran nya masing-masing. Peran tersebut menciptakan sebuah bentuk kolaborasi yang *efisien* terhadap berjalannya pengelolaan Objek Wisata Bukit Sakura Lawu.

BAB V
RELASI STAKEHOLDER DALAM TATA KELOLA OBJEK WISATA
BUKIT SAKURA LAWU

Dalam Bab ini penulis akan membahas terkait bagaimana *stakeholder* yang sudah di kemukakan dalam Bab IV sesuai dengan perannya masing-masing dalam berkolaborasi untuk pengelolaan Objek Wisata Bukit Sakura Lawu. Kolaborasi tersebut akan penulis bahas melalui teori *Collaborative Governance* Ansel dan Gash dengan mengacu dari beberapa topik proses kolaborasi menurut Ansel dan Gash dan enam elemen penting yang ditekankan oleh Ansel dan Gash dalam teorinya.

A. Relasi *Stakeholder* Bukit Sakura Lawu Pada Kondisi Mulai

Pada proses *Collaborative Governance* Ansel dan Gash terdapat kondisi mulai, dimana dalam kondisi ini merupakan titik awal sebuah proses kolaborasi. Pada proses ini para pemangku kepentingan memiliki tujuan masing-masing, sehingga mereka harus menyatukan semua kepentingan dan tujuan tersebut agar tercapai sebuah kolaborasi bersama. Proses kondisi mulai pada kolaborasi *stakeholder* Bukit Sakura Lawu dimulai dari pertemuan antara pihak KPH Perhutani dan organisai MPA Singo Lawu pada saat acara kehutanan Apel siaga bersama Bapak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, pemberian penghargaan kepada MPA Singo Lawu sebagai bentuk pengapresiasian kinerja dalam menjaga kawasan hutan, sehingga terjadi kerjasama dari kedua pihak tersebut.

Gambar 5.1 Penghargaan dari Perum Perhutani, serta simbolisasi pemberian lahan kawasan hutan sebagai objek wisata.



(Sumber: Dokumentasi Pokdarwis BSL)

Pada kondisi mulai terjadi tiga tahapan di dalamnya, yaitu ketidakseimbangan sumber daya, kendala pada partisipatif, dan konflik kondisi awal. Ketidakseimbangan daya adalah keadaan dimana pemangku kepentingan lebih memiliki kewenangan atau power yang kuat dibandingkan dengan *stakeholder* lain untuk keuntungan pribadi, hal ini menimbulkan konflik di dalam sebuah kolaborasi. Sumber daya pada *stakeholder* Bukit Sakura Lawu sudah berkomitmen untuk dapat menyelaraskan kepentingan tersebut menjadi kepentingan bersama, sehingga dalam proses ini tidak ada ketimpangan kekuasaan. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Nuryono selaku ketua Kelompok Sadar Wisata Bukit Sakura Lawu.

“pada awal pembukaan Objek Wisata Bukit Sakura Lawu para *stakeholder* yang berkaitan sudah berkomitmen untuk bekerjasama dan memang nanti ada bagi hasil di dalamnya serta sudah memahami wilayah kerja masing-masing”

Tahap selanjutnya yaitu kendala pada partisipatif, keberadaan partisipan memang sangat penting karena berpengaruh pada berjalannya proses kolaborasi kedepannya, jika dalam suatu proses kolaborasi hanya terdiri dari satu atau dua partisipan tidak dapat disebut sebagai sebuah kolaborasi. *Stakeholder* yang menjadi partisipan Bukit Sakura Lawu sudah memenuhi syarat untuk berkolaborasi yaitu terdiri dari beberapa *stakeholder* di dalamnya, seperti KPH Perhutani, Palawi,

LMDH Dono Lestari, MPA Singo Lawu dan Pokdarwis BSL. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada kendala pada partisipatif kolaborasi di Bukit Sakura Lawu.

Kontekstualisasi pernyataan tersebut dengan teori *Collaborative Governance* Ansel dan Gash pada kendala partisipatif, jika insentif untuk berpartisipasi dalam tata kelola kolaboratif meningkat pemangku kepentingan menganggap pencapaian tujuan mereka bergantung pada Kerjasama dari pemangku kepentingan lainnya. Ansel dan Gash membagi insentif berpartisipasi untuk pencapaian tujuan menjadi dua model, yaitu;

1. Jika terdapat cara lain dimana *stakeholder* secara mandiri dapat mengejar tujuan mereka, maka tata kelola kolaboratif dapat berhasil jika pemangku kepentingan menganggap diri mereka saling ketergantungan.
2. Jika terdapat ketergantungan kolaboratif menjadi tempat *eksklusif*, maka *stakeholder* lain bersedia melakukan pekerjaan untuk mendapatkan jalan *alternatif*, hal tersebut dilakukan untuk menghargai proses dari kolaboratif.

Kedua model insentif untuk berpartisipasi menurut Ansel dan Gash (2007) tersebut, terdapat dalam pola kolaborasi antar *stakeholder* dalam pengelolaan Objek Wisata Bukit Sakura Lawu, pernyataan tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Edi selaku ketua MPA Singo Lawu.

“kalo dari bagian yang lain kami merasa saling bergantung, karena kalo tidak ada LMDH juga tidak bisa berjalan, tidak ada Pokdarwis juga tidak akan terkelola objek wisatanya dan kalo yang disini kan itu bentuk sukarela juga jadi kalo bekerja itu bersama”

Tahap yang terakhir yaitu konflik kondisi awal, pada tahap ini merupakan sebuah tahapan umum yang terjadi pada setiap proses kolaborasi. Konflik yang terjadi pada kondisi awal dapat bermula pada kepentingan apa yang akan di bawa oleh masing-masing *stakeholder* pada saat berkolaborasi nantinya, jika ada yang lebih mendominasi atau mengedepankan kepentingan pribadi hal tersebut akan menghambat proses kolaborasi. Seperti hasil wawancara penulis dengan ketua MPA Singo Lawu Bapak Edi Mulyadi, yang menyatakan bahwa, jika ada problem

antar *stakeholder* biasanya diselesaikan secara kekeluargaan, jadi pada awal pembentukan objek wisata belum terdapat masalah yang cukup serius.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Ansel dan Gash (2007) bahwa pada konflik kondisi mulai merupakan konflik yang bersifat sementara dan relatif, karena sebuah proses kolaborasi dibangun atas dasar sejarah dari kelembagaan. Pada tahapan konflik kondisi awal merupakan sebuah penerapan kondisi nyata dari elemen penting kelima (Ansel dan Gash, 2007), yaitu forum bertujuan untuk membuat keputusan bersama berdasarkan konsensus, dalam hal ini seperti penyelesaian konflik dengan cara musyawarah.

Selain tiga tahapan diatas, pada kondisi mulai terdapat proses relasi *stakeholder* berupa kepemimpinan fasilitatif, dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis kepemimpinan yang terdapat di Bukit Sakura Lawu Kabupaten Karanganyar di pimpin oleh pihak KPH Perum Perhutani selaku penanggung jawab dari kepemilikan lahan kehutanan, selanjutnya pada pelaksanaan di lapangan pihak POKDARWIS BSL (Kelompok Sadar Wisata Bukit Sakura Lawu) yang bertanggung jawab dimana mereka berperan selaku pengelola tempat wisata tersebut. Vangendan Huxham, mengatakan bahwa kepemimpinan yang efektif diperlukan untuk memobilisasi pemangku kepentingan, bertujuan untuk mendorong sebuah kerja sama. Kepemimpinan dinilai sangat penting untuk menetapkan dan mempertahankan aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan mengeksplorasi keuntungan bersama (Ansel dan Gash, 2007).

Secara langsung Pokdarwis Bukit Sakura Lawu menjadi pengelola serta memiliki kewenangan kepemimpinan di Objek Wisata Bukit Sakura Lawu, tetapi dalam garis ke organisasian pihak Pokdarwis juga mendapat mandat dari pihak LMDH Dono Lestari, begitupun pihak LMDH yang berlaku sebagai tangan kedua pihak perhutani. Dari garis kolaborasi tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pemimpin sangat penting dalam proses kolaborasi.

B. Relasi *Stakeholder* Bukit Sakura Lawu Pada Proses Kolaborasi

Pada proses kolaborasi relasi yang terjadi merupakan relasi yang bersifat *fleksibel* karena dapat berubah sesuai dengan keadaan dan waktu. Pada proses kolaborasi merupakan suatu bentuk proses yang kompleks dimana pasti terjadi dalam suatu organisasi atau lembaga, karena di dalam proses kolaborasi ini akan ada beberapa tahapan yang menjadi dasar terjadinya tata Kelola kolaborasi antar *stakeholder*.

Tahapan yang pertama yaitu tahap awal atau dialog tatap muka, pada tahap ini *stakeholder* yang berkolaborasi melakukan pertemuan untuk melanjutkan proses kolaborasi dalam pengelolaan Objek Wisata Bukit Sakura Lawu. Pertemuan dalam rangka untuk melanjutkan proses kolaborasi tersebut, melibatkan Pokdarwis, MPA Singo Lawu, dan LMDH Dono Lestari.

Gambar 5. 2 pertemuan *stakeholder* BSL



(Sumber: dokumentasi Pokdarwis BSL)

Menurut Ansel dan Gash (2005) tahap awal merupakan tahapan dimana dari setiap *stakeholder* memutuskan untuk melakukan suatu pertemuan dengan tujuan membahas bagaimana antar *stakeholder* nanti akan bekerjasama dalam melakukan suatu kolaborasi, pada tahapan ini *stakeholder* yang terlibat berusaha untuk menyatukan tujuan, dan paradigma kolaborasi agar tidak terjadi ketimpangan dan membentuk kubu yang bertentangan dengan tujuan kolaborasi. Menurut Ansel dan Gash (2007) pada tahap ini merupakan tahap inti proses awal karena sebuah momen untuk membangun kepercayaan, saling menghormati satu sama lain, pemahaman bersama, dan setuju untuk melakukan komitmen bersama, sesuai dengan elemen

penting Ansel dan Gash yang ketiga yaitu, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.

Relasi yang telah dibangun pada kondisi awal yaitu tahap dialog tatap muka oleh *stakeholder* yang akan berkolaborasi dalam pengelolaan Objek Wisata Bukit Sakura Lawu dikuatkan dengan teori Ansel dan Gash (2007), yang menyatakan bahwa dialog tatap muka diperlukan sebagai syarat kerjasama. Dialog tatap muka untuk memperkuat *stereotip* antar *stakeholder* atau perbedaan status untuk meningkatkan rasa saling menghormati dan membutuhkan satu sama lain. Sehingga dalam dialog tatap muka setiap *stakeholder* mengemukakan tujuan dan harapan masing-masing, untuk disatukan menjadi suatu kolaborasi tujuan bersama.

Tahap selanjutnya yaitu komitmen terhadap proses, relasi komitmen yang terjadi di Objek Wisata Bukit Sakura Lawu melibatkan dari pihak pertama yaitu Perum Perhutani Semarang, Lembaga Masyarakat Desa Hutan Dono Lestari, Masyarakat Peduli Api Singo Lawu, Kelompok Sadar Wisata BSL, serta pihak investor Palawi. Dari beberapa *stakeholder* tersebut menyetujui untuk melakukan komitmen bersama sebagai bentuk pertanggung jawaban dari kerja sama yang akan dilakukan.

Dari komitmen yang telah terbentuk tersebut, akhirnya menciptakan sebuah pola kerjasama antar *stakeholder*, dengan sistem kolaborasi. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara penulis bersama Bapak Nuryono selaku ketua LMDH Dono Lestari.

”karena dari tiap organisasi sudah bersama dan sepakat melakukan kerjasama, jadi kita buat pertemuan rutin setiap bulan untuk membahas capaian selama satu bulan dan kegiatan satu bulan kedepan, biasanya LMDH menyampaikan pesan dari Perhutani karena tidak bisa hadir rapat”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang melibatkan beberapa *stakeholder* dalam pengelolaan Bukit Sakura Lawu sudah merupakan komitmen bersama sebagai bentuk kolaborasi.

Gambar 5.3 rapat rutin LMDH dengan MPA, dan Pokdarwis



(Dokumentasi LMDH Dono Lestari)

Relasi komitmen yang terbentuk yaitu sebuah kepercayaan yang memberikan dampak positif baik secara *implisit* maupun *eksplisit*, karena pada relasi komitmen merupakan ajang pertukaran pikiran yang diimplikasikan pada keinginan masing-masing tetapi menyelaraskan pada satu tujuan bersama untuk menciptakan manfaat jangka panjang. *Stakeholder* yang ikut serta dalam berkolaborasi menyatakan komitmennya untuk membentuk sebuah relasi demi terwujudnya tujuan bersama dan untuk keuntungan bersama (Affandi, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan bahwa, *Memorandum of Understanding (MoU)* atau kontrak kerja sama antara pihak perhutani dengan pihak Pokdarwis BSL merupakan hubungan mitra usaha, hal tersebut dikarenakan lahan dari Bukit Sakura Lawu masih menjadi hak milik yang sah dari pihak Perum Perhutani. Sehingga dalam pengelolaan Objek Wisata antara pengelola dengan pihak Perum Perhutani memiliki kesepakatan bagi hasil. Bagi hasil tersebut berkisar 25% untuk perhutani dan sisanya yaitu 75% untuk pihak pengelola. Kesepakatan bagi hasil tersebut didapatkan berdasarkan pendapatan Objek Wisata dalam penjualan tiket, dimana kalkulasi untuk penjualan tiket masuk per-orang Rp. 10.000-, (*sepuluh ribu rupiah*), dan untuk tiket camping Rp. 75.000-, (*tujuh puluh ribu rupiah*). Bagi hasil diberikan setiap bulan dengan syarat laporan pendapatan Bukit Sakura Lawu diatas 75% setiap bulannya. Pendanaan pengelolaan Objek Wisata Bukit Sakura Lawu pihak perhutani menyediakan investor yaitu Palawi Risorsis.

Tahap yang ketiga yaitu pemahaman bersama, pada tahap ini dari tiap *stakeholder* sudah lebih memahami relasi yang terbentuk, dimana dari masing-masing *stakeholder* sudah melakukan tahapan penyatuan tujuan bersama, tahapan untuk berkomitmen terhadap proses dan selanjutnya adalah tahapan untuk memberikan pemahaman pada tiap *stakeholder*. Pada tahapan ini relasi yang terbentuk yaitu sebagai bentuk kepastian antar *stakeholder* atau untuk memastikan bahwa dari tiap *stakeholder* sudah paham terhadap perannya masing-masing dan mengetahui hubungan atau relasi antar *stakeholder* dalam melakukan kolaborasi. Sehingga dalam berjalannya sebuah kolaborasi tidak terjadi kesalahpahaman satu sama lain.

Tahapan yang terakhir yaitu relasi hasil menengah. Hasil menengah atau hasil sementara merupakan sebuah hasil dari proses kolaborasi yang belum berjalan sepenuhnya, pada tahap hasil sementara terjadi dinamika antar *stakeholder* di dalamnya, seperti yang terjadi pada kolaborasi *stakeholder* Bukit Sakura Lawu. Dinamika yang terjadi berupa ketidakjelasan antara pihak Perum Perhutani, pihak investor yaitu Palawi Risorsis dan dengan pihak Pokdarwis BSL. Sehingga pada tahapan ini perlu dilakukan sebuah evaluasi bersama untuk mengetahui dimana letak kesalahan yang menghambat sebuah proses kolaborasi. Relasi yang terbentuk hanya sebatas mencakup *stakeholder* yang sebelumnya pernah berkolaborasi, sehingga pada tahap ini belum terlihat cakupan relasi yang lebih luas.

Konflik tersebut dikarenakan ketidakjelasan dari pihak investor atas kerjasama yang akan dilakukan. Pemindehan tanggungjawab dari Perum Perhutani kepada Palawi Risorsis menyebabkan terhambatnya pengelolaan di Bukit Sakura Lawu sendiri, hal ini terjadi dalam kurun waktu sekitar 2-3 tahun terakhir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahap hasil sementara terdapat kesenjangan atau konflik antar *stakeholder* dalam suatu proses kolaborasi, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ansel dan Gash (2005) bahwa pada hasil sementara merupakan tumpukan kegagalan pada kondisi mulai. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Nuryono.

”waktu ada konflik itu memang status BSL sempat digantung, dari pihak investor yang tidak memberi kejelasan. Jadi kalo pembiayaan pengelolaan selama itu Pokdarwis menggunakan dana pribadi dan diambil dari hasil penjualan tiket objek wisata”.

Pada proses kolaborasi terjadi relasi desain kelembagaan, merupakan faktor struktural penting sebelum resmi mendirikan sebuah organisasi bersama dan sebagai bentuk kelengkapan administrasi sebuah organisasi atau perusahaan. Pada desain kelembagaan juga menentukan siapa saja yang akan terlibat dalam proses kolaborasi, kelompok yang dipilih adalah yang memiliki kesempatan untuk siap berkolaborasi serta memiliki kepentingan bersama. Bukit Sakura Lawu dalam perihal administratif sudah lengkap dan sudah tersusun dengan baik. Seperti yang telah di paparkan oleh Bapak Nuryono selaku ketua POKDARWIS BSL.

“kita menggandeng masyarakat sekitar tentunya, dan rata-rata orang yang masuk kedalam organisasi adalah orang yang juga tergabung dalam organisasi kehutanan, jadi mereka paham dalam menjaga dan merawat hutan ini, setelah itu kita buat Pokdarwis BSL ini”

Sehingga relasi pada tahap ini dapat disimpulkan bahwa, Pokdarwis ikut serta menggandeng masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam desain kelembagaan Pokdarwis serta administratif antar *stakeholder* sudah terbentuk. Relasi kelembagaan merupakan sebuah hukum, aturan dan tata cara dalam berorganisasi. Paradigma pola relasi yaitu negara, masyarakat, dan swasta, rancangan bangun kelembagaan di dasarkan pada prinsip-prinsip bahwa pemerintah bukan lah satu-satunya aktor yang mengatur dalam urusan publik atas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan (Dwiyanto, 2013).

C. Relasi *Stakeholder* Bukit Sakura Lawu Hasil Akhir

Relasi yang terjadi pada tahapan ini semakin kuat dan semakin jelas, karena pada tahapan ini merupakan tahap akhir atau sebuah hasil dari sebuah kolaborasi. Relasi yang terjadi pada tahap ini dijadikan sebagai acuan keberhasilan sebuah proses kolaborasi, bentuk kepercayaan meningkat antar *stakeholder* merupakan suatu keberhasilan dari proses ini. Berjalannya waktu kepercayaan dari tiap *stakeholder* yang berkolaborasi dalam pengelolaan Bukit Sakura Lawu semakin meningkat, hal tersebut dikarenakan munculnya rasa saling

ketergantungan satu dengan yang lain. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Eko selaku ketua staf umum Perum Perhutani Divre Jateng.

“kepercayaan dari perhutani kepada pengelola Bukit Sakura Lawu atau POKDARWIS BSL sudah cukup percaya, karena hingga saat ini tempat wisata tersebut masih mempertahankan keaslian hutannya dan menjaga dari kerusakan yang dapat terjadi”

Pada tahap hasil akhir Ansel dan Gash (2005) mengungkapkan bahwa waktu, kepercayaan, dan ketergantungan bukanlah suatu keunggulan kontingensi (*contingency*) Lembaga, karena faktor pengaruh tersebut yang tidak diuraikan sebagai variable yang berbeda. Chris Ansel (Christopher, 2014) menyatakan bahwa, lembaga publik dapat mengelola hubungan antara pemerintahan dan demokrasi secara efektif jika mereka berfokus pada membangun persetujuan untuk pemecahan masalah public. Pragmatis pemerintahan menyimpulkan bahwa jika pemerintah adalah untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik, pengetahuan teknis para ahli harus disatukan dengan kepekaan terhadap masalah lokal, situasi, dan pengetahuan. Namun, jawabannya tidak terletak pada birokrasi yang menyusut. Itu hanya akan memperdalam ketidakpercayaan. Sebaliknya, penekanannya harus pada mengambil yang terbaik dari kedua belah pihak untuk menemukan cara inovatif dan efektif untuk memecahkan masalah publik yang berkepanjangan.

Dalam relasi proses kerjasama dengan pihak Palawi Risorsis mengalami sedikit kendala yang mengakibatkan tidak berjalannya beberapa kegiatan Objek Wisata Bukit Sakura Lawu. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Bapak Nuryono selaku ketua Pokdarwis BSL.

“selama 2-3 tahun terakhir terdapat problem antara pihak pengelola dan anak perhutani yaitu palawi yang mengganggu pekerjaan dari pihak pengelola BSL sendiri dan mengganggu aktifitas pedagang BSL. Karena pedagang ikutnya ke tempat wisata, jika tempat wisata jalan maka pedagang jalan, begitupun sebaliknya. Jadi problem nya dulu sempat mau ada kerjasama antara pengelola BSL dengan palawi bertindak sebagai investor. Dari pihak pengelola sudah teken atau tanda tangan kontrak tetapi sampai sekarang belum kunjung di realisasikan, apabila dari pihak investor jalan maka ke bawah nya juga akan jalan, hal tersebut seperti yang dirasakan pedagang jika tempat wisata ramai maka pedagang juka akan mendapatkan keuntungan lebih. Hal tersebut bisa

terjadi karena tidak boleh ada pengembangan sebelum investor melakukan sendiri, hal ini termasuk pada pembekuan media social dari BSL itu sendiri”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontrak kerjasama antara pihak pengelola Pokdarwis BSL dengan pihak investor Palawi Risorsis sempat mengalami hambatan, namun kesepakatan kerja sama tersebut pada tanggal 2 April 2023 sudah mendapat jawaban dari pihak investor. Pihak investor mengalami keterlambatan dalam memberikan kepastian Kerjasama dikarenakan terjadinya keterlambatan peralihan dari pihak perhutani kepada Palawi Risorsis. Keterlambatan tersebut berupa perubahan struktur administrative dari Perum Perhutani kepada Palawi Risorsis, dikarenakan Perum Perhutani memiliki banyak wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga Objek Wisata Bukit Sakura Lawu mengalami keterlambatan dalam penanganan. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara penulis kepada Bapak Nuryono selaku ketua Pokdarwis Bukit Sakura Lawu.

“terhitung sudah 3 tahun terakhir, keterlambatan tanda tangan kerjasama dari Palawi, tetapi *Alhamdulillah* kemarin 2 minggu sebelum lebaran tepatnya tanggal 2 April 2023 sudah di setujui, dan Palawi sudah mulai melakukan pembangunan di Bukit Sakura Lawu setelah lebaran kemarin”

Pada pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk relasi kolaborasi pada hasil akhir yang terjadi sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya kepercayaan, pembuktian pencapaian pengelola Bukit Sakura Lawu, serta penyelesaian konflik dengan Pihak Palawi Risorsis. Karena banyak studi yang mencatat bahwa proses kolaborasi merupakan sebuah proses yang hanya memakan waktu saja. Akan tetapi, pandangan tersebut bisa berubah dengan adanya tingkat kepercayaan yang cukup tinggi, sehingga waktu yang diperlukan lebih signifikan.

Tabel 5.1 Data kolaborasi *stakeholder* dalam pengelolaan Bukit Sakura Lawu Kabupaten Karanganyar

No	Pihak –pihak yang terkait	Bentuk relasi kolaborasi	Keterangan (proses kolaborasi Ansel dan Gash)
1	KPH Perhutani – MPA Singo Lawu	Terjalin Kerjasama awal berupa pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang baik, yaitu pemberian lahan kehutanan untuk dijadikan objek wisata	Terjadi pada kondisi mulai
2	Perum Perhutani – Palawi Risorsis	Hubungan antara perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dengan anak perusahaan	Terjadi pada kondisi tahap hasil sementara
		Melakukan peralihan dari Perum Perhutani kepada Palawi Risorsis serta sebagai investor BSL	
3	LMDH Dono Lestari – Pokdarwis BSL	Bentuk kolaborasi yang terjadi yaitu dalam menjaga dan memberdayakan SDA Bukit Sakura Lawu	Merupakan sebuah tahapan hasil akhir berupa ketergantungan

		LMDH Berkolaborasi dalam bentuk perantara antara Perum Perhutani	Merupakan sebuah tahapan hasil akhir berupa ketergantungan
4	MPA Singo Lawu - Pokdarwis BSL	Berkolaborasi dalam menjaga Bukit Sakura Lawu dari kerusakan hutan berupa kebakaran, tanah longsor dll	Merupakan sebuah tahapan hasil akhir berupa ketergantungan
5	Palawi Risorsis – Pokdarwis BSL	Berkolaborasi dalam melakukan pembangunan Bukit Sakura Lawu, dimana Palawi Risorsis sebagai investor	Merupakan sebuah tahapan hasil akhir berupa ketergantungan
6	LMDH Dono Lestari – MPA Singo Lawu	Hubungan antar organisasi pecinta alam	Pada tahap kondisi mulai, yaitu insentif untuk berpartisipasi
7	Perhutani – Pokdarwis BSL	Berkolaborasi dalam bentuk mitra usaha	Proses kolaborasi, yaitu pada tahap komitmen terhadap proses

Sumber : Data diolah oleh peneliti hasil wawancara para informan

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa, masing-masing *stakeholder* yang berkolaborasi dalam pengelolaan Objek Wisata Bukit Sakura Lawu Kabupaten Karanganyar memiliki bentuk kolaborasi masing-masing. Kolaborasi tersebut yang menjadikan sebuah Objek Wisata berkembang dengan baik dalam pengelolaannya, serta dari kolaborasi tersebut dapat menimbulkan dampak positif baik bagi

stakeholder yang terlibat maupun masyarakat setempat. pernyataan tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara penulis bersama Bapak Ali Mas'udin selaku tokoh masyarakat setempat.

“saya merasakan dampak yang baik dari kehadiran Bukit Sakura ini, penghasilan bertambah dan sekarang tidak ada longsor lagi di lereng sekitar desa, selain itu pengelola wisata juga masih menggandeng masyarakat dalam kegiatan-kegiatan di Bukit Sakura Lawu”

Pada dasarnya relasi antar *stakeholder* yang terjadi di Bukit Sakura Lawu Kabupaten Karanganyar merupakan suatu bentuk upaya penyesuaian pola pikir dalam pengelolaan objek wisata. Hal ini dikuatkan dengan elemen keenam menurut Ansel dan Gash bahwa fokus relasi kolaborasi adalah pada manajemen kerjasama dan untuk penerapan kebijakan publik. Sehingga dalam berinteraksi atau berhubungan satu sama lain terdapat timbal balik yang menguntungkan dan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Namun terlepas dari terjadinya konflik antar *stakeholder* Bukit Sakura Lawu kolaborasi yang terjadi dan relasi yang terbentuk antara *stakeholder* sudah membuktikan kejelasan dan keseimbangan sumber daya. Hal tersebut dapat terjadi karena *stakeholder* yang tergabung dalam pengelolaan Bukit Sakura Lawu sudah memiliki komitmen bersama untuk berproses, memiliki rasa ketergantungan yang sama, dan memiliki tingkat kepercayaan antara *stakeholder*. Sehingga berjalannya proses kolaborasi sudah sesuai dan sudah berjalan dengan baik, seperti tiga tahapan yang dikemukakan oleh Ansel dan Gash yaitu pada tahap kondisi awal, proses Kolaborasi dan hasil akhir.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Collaborative Governance merupakan tata kelola kolaborasi antar *stakeholder*, dalam berjalannya suatu kolaborasi tentu melewati sebuah proses. Diantaranya yaitu terdapat kondisi awal, munculnya kepemimpinan fasilitatif, terbentuknya desain kelembagaan secara ke administrasian, lalu terdapat proses kolaborasi yang merupakan inti dari sebuah kolaborasi antar *stakeholder*, dimana dalam proses ini terdapat empat tahapan yaitu tahap tatap muka, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil menengah. Setelah itu terdapat proses terakhir dari suatu kolaborasi yaitu kepercayaan dan ketergantungan antar *stakeholder* terbentuk.

1. Peran dari *stakeholder* merupakan faktor penting dalam berjalannya suatu kolaborasi, peran *stakeholder* yang terikat dengan Bukit Sakura Lawu, seperti Perum perhutani sebagai badan pemerintahan pembuat kebijakan, selanjutnya terdapat Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH Dono Lestari berperan sebagai lembaga yang memberikan pengetahuan serta pemberdayaan kepada Pokdarwis BSL dan masyarakat sekitar lereng Gunung Lawu, dan menjembatani antara pihak pengelola dengan Perhutani dan Investor Palawi Risorsis. *Stakeholder* ketiga yaitu MPA Singo Lawu, memiliki peran mengawasi serta menjaga Objek Wisata dari kerusakan alam dan pembangunan yang berbentuk pengerasan. Pokdarwis BSL memiliki peran dalam pengelolaan Objek Wisata secara langsung, *stakeholder* yang terakhir yaitu Palawis Risorsis sebagai investor utama Objek Wisata Bukit Sakura Lawu Kabupaten Karangayar.

2. Relasi antar *stakeholder* Bukit Sakura Lawu sudah dapat terbentuk sejalan dengan proses kolaborasi yang terjadi, relasi yang terbentuk tersebut memberikan dampak positif baik secara *eksplisit* maupun *implisit* bagi *stakeholder* terkait maupun masyarakat sekitar Objek Wisata Bukit Sakura

Lawu, akan tetapi di tengah proses kolaborasi terjadi kesenjangan relasi yaitu antara pihak pengelola dengan pihak investor. Pihak investor tidak segera memberikan kejelasan terkait kontrak kerjasama sebagai investor di Bukit Sakura Lawu, hal tersebut berdampak pada pengelolaan Bukit Sakura Lawu 3 tahun terakhir. Keterlambatan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut sudah diselesaikan pada tanggal 2 April 2023, sehingga kolaborasi *stakeholder* dalam pengelolaan Objek Wisata Alam Bukit Sakura Lawu telah diterapkan dengan baik sesuai proses kolaborasi menurut Ansel dan Gash (2007).

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai *Collaborative Governnance* Dalam Pengelolaan Objek Wisata Bukit Sakura Lawu Kabupaten Karanganyar, maka dari itu peneliti menyarankan:

1. Dalam proses kolaborasi yang dilakukan dari pihak negara maupun non-negara yaitu pemerintah, dan masyarakat harus saling mendukung satu sama lain, pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan juga pembinaan mengenai peningkatan SDM serta fasilitas yang ada di Objek Wisata, karena dalam pengembangan SDM dan fasilitas wisata masih kurang lengkap, hal tersebut mengingat dalam kegiatan wisata membutuhkan lebih banyak SDM dan kelengkapan fasilitas, serta kurangnya promosi tempat wisata sehingga minoritas saja masyarakat yang mengetahui.
2. Pihak KPH Perhutani selaku penanggung jawab dari Objek Wisata Bukit Sakura Lawu seharusnya bisa menegaskan lagi bagaimana status Bukit Sakura Lawu untuk masa sekarang dan yang akan datang. Kejelasan status tersebut berdampak pada penghasilan dan juga keberlanjutan pengelolaan Bukit Sakura Lawu. Pihak Perhutani harus selalu mendukung dalam proses pengembangan dan pengelolaan Objek Wisata Bukit Sakura Lawu.

Lampiran

Draft wawancara (instrument penelitian)

1. Draft wawancara untuk Bapak Nuryono
 - a. Menurut Bapak Nuryono selaku ketua LMDH Dono Lestari, Lembaga tersebut berperan seperti apa dalam pengelolaaa Bukit Sakura Lawu?
 - b. Dalam proses kolaborasi terdapat tingkat pasrtisipasi, lalu di dalam Objek Wisata Bukit Sakura Lawu bagaimana pasrtisipasi nya?
 - c. Bagaimana awal mula berdirinya Bukit Sakura Lawu?
 - d. Pada awal kolaborasi dalam pengelolaan Objek Wisata apakah terdapat konflik?
 - e. Terkait kontrak Kerjasama dari tiap *stakeholder* yang terlibat, bagaimana isi kesepakatan tersebut?
 - f. Bagaimana kontrak Kerjasama yang sempat tertunda dengan pihak investor?
2. Draft wawancara untuk Bapak Edi Mulyadi
 - a. Menurut Bapak Edi selaku ketua MPA Singo Lawu, bagaimana peran Lembaga tersebut berkolaborasi dalam pengelolaan Bukit Sakura Lawu?
 - b. Kontribusi apa yang telah diberikan MPA Singo Lawu terhadap Bukit Sakura Lawu?
 - c. Menurut Bapak Edi dalam pengelolaan Bukit Sakura Lawu apakah sudah merasa saling ketergantungan satu sama lain?
3. Draft wawancara untuk Bapak Eko
 - a. Terkait dengan pemberian penghargaan kepada MPA Singo Lawu, bagaimana status kepemilikan lahan Bukit Sakura Lawu?
 - b. Bagaiaman kinerja dari pihak Pokdarwis Bukit Sakura Lawu dalam pengelolaan wisata, mengingat termasuk kedalam wana wisata?
 - c. Menurut Bapak Eko, bagaimana konflik antara investor dengan Pokdarwis BSL, bagaimana tindak lanjutnya?

4. Draft wawancara untuk Ibu Fufung
 - a. Menurut Ibu Fufung sebagai pedagang Bukit Sakura Lawu dampak positif apa yang pedagang dapatkan dari adanya kolaborasi *stakeholder*?
 - b. Terkait konflik yang terjadi antara pokdarwis dengan investor apakah berdampak pada pedagang?
5. Draft wawancara untuk Bapak Ali Mas'udin
 - a. Bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar terhadap Objek Wisata Bukit Sakura Lawu?
 - b. Menurut Bapak Ali, adanya Bukit Sakura Lawu apakah berdampak bagi ekonomi masyarakat?

Dokumentasi

<p>Wawancara dengan Bapak Nuryono (Ketua Pokdarwis dan LMDH Dono Lestari)</p> 	<p>Wawancara dengan Bapak Edi Mulyadi (Ketua MPA Singo Lawu)</p> 
<p>Wawancara dengan Bapak Eko staf umum Perum Perhutani Semarang</p>	<p>Wawancara dengan Ibu Fufung pedagang BSL</p>



Wawancara dengan Bapak Ali Mas'udin tokoh masyarakat Desa Tlogo Dringo

Pelatihan penanganan kerusakan hutan



Area parkir Bukit Sakura Lawu

Warung pedagang Bukit Sakura Lawu



DAFTAR PUSTAKA

- Affandi. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator). *Zanafa Publishing*.
- Asmi, S. K. (2018). Tradisi Bersih Desa Dukutan (Studi Kebudayaan Masyarakat Desa Nglurah Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar). *Universitas Sebelas Maret*.
- Badruddin, S. (2015, Juli 8). Pengertian Pembangunan. *Bappeda.bulelengkap.go.id*. Choiria, I., Hanafi, I., & Mochamad, R. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Studi pada LMDH Salam Jati Luhur KPH Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik*, 2112-2117.
- Chris, A., & Gash, A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 543-571.
- Darmawan, & Nurrahmi, W. (2020). *Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi Dan Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor Internal Inspektorat Kota Bandung*. Jawa Barat: Repository Universitas Widyatama.
- Delpiero, M. D. (2019). Pendekatan *Collaborative Government* Dalam Pengembangan Kawasan Objek Wisata Goa Putri di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. 34-50.
- Dewi, N. Y. (2019). Dinamika *Collaborative Governance* Dalam Studi Kebijakan Publik . *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 203-204.
- Digdowniseiso, K. (2019). *Teori Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Djulianto. (2022). *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Desa Wisata Sambi, Pakembinangan, Pakem Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi FISIP*, 50-65.
- Dwiyanto, A. (2016). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif. *UGM Press*, 32-35.
- Emzir. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. Jakarta: Rajawali
- Pers. Fadlillah , N., Basuni, S., & Sunarminto, T. (2017). Pengendalian Kebakaran Hutan Oleh Masyarakat Peduli Api (MPA) Di Taman Nasional Gunung Ciremai. *Institut Pertanian Bogor*, 216-222.
- Gayatri, I. A. (2019). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Nusa Penida di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. *Asdaf Kabupateb Klungkung Provinsi Bali*, pp. 1-12.
- Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis Peran *Stakeholder* Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Kabupaten Rembang.

Departemen Ilmu Administrasi Publik, 50-70.

- Hansen, S. (2020). Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, 283-294.
- Hardjanto. (2017). *Pengelolaan Hutan Rakyat*. Jawa Barat: IPB Press.
- Hariadi, A. (2017). *Collaborative Governance* Dalam Pariwisata Pantai Pesisir Pantai Pasir Putih . *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 45-60.
- Hetifah. (2019). Perbedaan Konsep *Governance* dan *Government*. *Jurnal Administrasi Publik*, 30-60.
- Ikhsan, M. (2018). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Sinjai. *Skripsi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar*, 1-78.
- Isnayati. (2019). Implementasi Kebijakan Retribusi Sektor Pariwisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba. *Skripsi Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, pp. 1-57.
- Kusnardijo, B. (2020). Pengertian *Collaborative Governance* dalam Teori Ansel dan Gash. *Administrasi Publik*, 60-70.
- Mulyadie. (2015). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di KawasanTeluk Palu. *Jurnal Katalogis*, 90-94.
- Mutiawati, T., & Sudarmo. (2021). *Collaborative Governance* dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Wacana Publik*, 82-90.
- Nurfadila. (2018). Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Lewaja di Kabupaten Enrekang. *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 50-67.
- Nufus, L. Z. (2022). Implementasi Program Adiwiyata Dalam Membentuk Dan Mengamalkan Nilai Hablum Minal 'Alam Siswa Man 1 Malang. *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Nurhikma. (2019). Strategi Pengelolaan Objek Wisata Pantai Lamangkia (Studi Kasus Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Takalar). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 67-80.
- Prasetyo, E., Utami, P., & Amanda, T. A. (2021). Perancangan Model Tata Kelola Kolaboratif Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Data Manusia Perdesaan di Kabupaten Padeglang. *Jurnal Administrasi Publik*, 271-296.
- Puspitasari, D., Andayani, & Hastuti, S. (2018). Struktur Cerita Dan Nilai Kepahlawanan Dalam Cerita Rakyat Di Kabupaten Karanganyar Sebagai Materi Ajar Di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia*, 73-82.
- Putra, D. A. (2021). *Collaborative Government* Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul (Studi Kasu BUMDes) Maju Mandiri & Kelompok Sadar Wisata Bejiharjo, Karangmojo Gunung Kidul 2017-2018. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 40-65.

- Rahardjo, M. (2017). Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif : Konsep dan Prosedurnya. *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 45-65.
- Rahmawati, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone. *Ilmu Administrasi Negara*, 1- 104.
- Rahmi, K. (2017). Politik Pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Bintan Tahun 2013-2015. *Jurnal JOM Fisip*, 1-16.
- Risorsis, P. (2018). *Perum Perhutani RPJMD 2018-2023 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).Kabupaten Karanganyar*.
- Safitri, S. (2020). Pengelolaan Wisata Danau Bambu Terhadap Minat Pengunjung Desa Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. *Institut Agama Islam Negeri Metro*, 50- 70.
- Sambodo, G. T. (2016). Pelaksanaan *Collaborative Governance* di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DIY. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*.
- Sasole, R. (2018). Pengelolaan Objek Wisata Pantai Halasy Dalam Rangka Menarik Kunjungan Wisatawan (Perspektif Ekonomi Islam). *Institus Agama Islam Negeri Ambon*, 50-70.
- Setyawan, A. (2004). Perkembangan Pariwisata Kabupaten Karanganyar Tahun 1987-2000. *Fakultas Sains Dan Sastra Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 18-146.
- Sholeha, N. (2016). Analisis Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Selayar. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Sinaga, K., & dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 79-90.
- Sujarweni. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Alfaberta*, 65-70.
- Taufiqurokhman. (2014). *KEBIJAKAN PUBLIK (Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah)*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Tongkotow, N. (2020). *Collaborative Government* Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratatotok. *Jurnal Ilmiah*, 70-85.
- Turyono. (2018). Pengelolaan Usaha Pertambangan Kabupaten Cilacap. *Fakultas Hukum UMP*, 10-15.
- Wibisono, D. (2013). *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Wulandari, A. (2020). *Komunikasi Pemangku Kepentingan (Stakeholder Communication)*. Yogyakarta: Sedayu Sukses Makmur.

Yuliana, E. (2010). *Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Dalam Pengembangan Pariwisata. Sebelas Maret University.*

Zaenuri, M. (2018). *Tata Kelola Pariwisata-Bencana Berbasis Collaborative Governance.* Yogyakarta: Explore.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Putri Patricia
Tempat/tgl Lahir : Karanganyar, 04 Januari 2001
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Nglebak 02/08, Nglebak Tawangmangu
Karanganyar
Status : Belum Menikah
Motto : Tidak ada yang bisa diandalkan kecuali diri sendiri
No. Hp : 082135409830
Email : putripatricia208@gmail.com

2. Pendidikan Formal

- a. TK Gerdu 02 2005
- b. SDIT Taruna Robbani 2006-2012
- c. SMP Walisongo Sragen 2013-2016
- d. SMA Walisongo Sragen 2016-2019

3. Pengalaman Organisasi

- a. Pengurus ISWA Ponpes Walisongo Sragen
- b. Dewan Ambalan Ponpes Walisongo Sragen
- c. HMJ Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
- d. PMII Rayon FISIP UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya,

Semarang, Senin 19 Juni 2023

TTD



Putri Patricia

1906016014